



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tahun 2025



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua dan atas perkenannya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bima Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.


LPPD Kabupaten Bima Tahun 2025 dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama tahun 2025. Selain itu, laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga LPPD Kabupaten Bima Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bima. Hasil evaluasi baik berupa pandangan, catatan maupun saran sangat dibutuhkan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bima.

Terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bima, 26 Maret 2026
BUPATI BIMA,
Ady Mahyudi





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
1.1. Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Deografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	12
d. Jumlah Kecamatan	24
e. Kepegawaian	25
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	26
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	29
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	37
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..	43
1.1. Capaian Kinerja Makro	43
1.2. Indikator Kinerja Kunci	47
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	110
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	123
BAB IV PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	130
1. Urusan Pendidikan	130
2. Urusan Kesehatan	141
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151
4. Urusan Perumahan dan Pemukiman	157
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy	161
6. Urusan Sosial	176
BAB V PENUTUP	180

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Bima.....	5
Tabel 1.2	Kemiringan Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima	6
Tabel 1.3	Sungai-sungai yang Mengairi Daerah Irigasi di Kab. Bima	8
Tabel 1.4	Luas Areal Daerah Irigasi Kabupaten Bima	9
Tabel 1.5	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	11
Tabel 1.6	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Bima dan 2025	12
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP- EL yang telah rekam yang dirinci per Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2025	13
Tabel 1.8	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025	15
Tabel 1.9	Jumlah Kecamatan dan Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2025.....	24
Tabel 2.1	Perkembangan IPM Kabupaten Bima	43
Tabel 2.2	Angka Pengangguran di Kabupaten Bima.....	44
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bima	4
--	---



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Nomor 1655);
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.



- 6) Peraturan Bupati Bima Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
- 7) Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima;
- 8) Peraturan Bupati Bima Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bima;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026;
- 12) Peraturan Bupati Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Inspektorat Kabupaten Bima;
- 13) Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima;
- 14) Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima;
- 15) Peraturan Bupati Bima Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan,



Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;

- 16) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025;
- 17) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025
- 18) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025
- 19) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2025-2045;

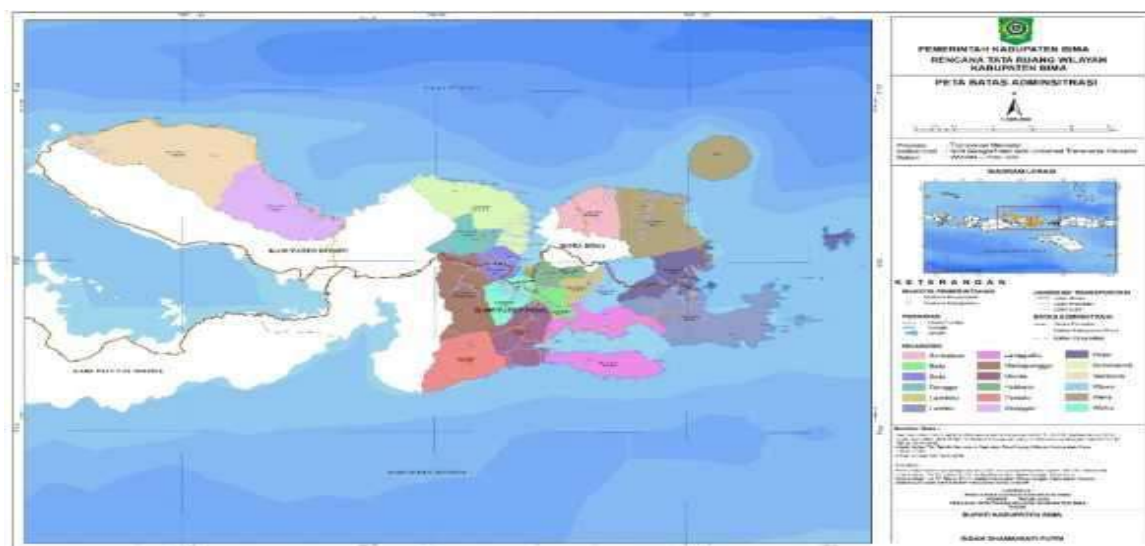
b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak di ujung timur pulau sumbawa yang ibu kotanya adalah Kecamatan Woha secara administrasinya, Kabupaten Bima berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Laut Flores
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Pulau Sumba NTT
- c. Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Adapun peta administrasi Kabupaten Bima dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut ini :

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bima



Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berada pada bagian paling timur Pulau Sumbawa, diapit oleh Kabupaten Dompu di sebelah Barat, Selat Sape di sebelah Timur dan Laut Flores di sebelah Utara serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bima berada pada posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi NTB-Provinsi NTT. Menurut letak astronominya, Kabupaten Bima berada pada 1180 44' – 1190 22' BT dan 080 08' – 08 057' LS. Selain itu, Kabupaten Bima memiliki 98 pulau yang tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bima yaitu **4.208,861 km²** yang terbagi menjadi 18 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi.



Tabel 1.1

Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Bima

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)
1	2	3	4	5	6
1	Monta	Tangga	14	45	228
2	Parado	Paradorato	5	71	261
3	Madapangga	Dena	11	63	238
4	Woha	Tente	15	33	106
5	Belo	Cenggu	9	30	45
6	Langgudu	Karumbu	15	70	323
7	Wawo	Maria	9	82	132
8	Sape	Naru	18	46	232
9	Lambu	Sumi	14	22	404
10	Wera	Tawali	14	38	465
11	Ambalawi	Nipa	6	59	181
12	Donggo	O'o	9	40	124
13	Sanggar	Kore	6	41	478
14	Tambora	Labuan Kananga	7	24	628
15	Bolo	Rato	14	52	67
16	Soromandi	Kananta	7	18	342
17	Lambitu	Kuta	6	15	65
18	Palibelo	Teke	12	33	72
Total			191	782	4.208

Sumber : Kabupaten Bima dalam Angka Tahun 2025 dan DPMDDES Kab.Bima 2025

Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terluas dengan luas mencapai 628,82 km² atau 14,3 persen dari luas Kabupaten Bima, diikuti Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Wera. Sementara itu kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Belo yang hanya memiliki luas sebesar 45,76 km². Jika diukur berdasarkan jarak ke Ibukota Kabupaten Bima. Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bima, jarak masing-masing sekitar 250 km dan 130 km.



- *Topografi*

Wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 0-477,50 meter di atas permukaan laut (dpl). Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayahnya dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-15%, 16-40% dan >40%. Pengelompokan kelas kemiringan pada setiap kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel 1.3

Tabel 1.2
Kemiringan Tanah
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bima

No	Kecamatan	Kelompok Kemiringan (ha)				Jumlah
		0-2 %	3-15 %	16-40%	>40 %	
1	Monta	3.010	4.200	13.020	7.711	27.941
2	Parado	1.800	2.500	10.200	3.200	17.700
3	Madapangga	980	2.350	9.000	3.800	16.130
4	Woha	4.593	784	2.364	2.715	10.456
5	Belo	4.409	4.108	7.698	2.569	18.784
6	Langgudu	960	600	5.000	4.200	10.760
7	Wawo	68	8.080	14.480	22.851	45.479
8	Sape	2.760	7.792	2.272	21.813	34.637
9	Lambu	2.500	3.400	6.500	8.100	20.500
10	Wera	1.832	5.700	16.696	23.592	47.820
11	Ambalawi	150	1.400	10.050	12.100	23.700
12	Donggo	1.024	12.100	10.172	13.268	36.564
13	Sanggar	3.500	16.488	13.405	13.023	46.376
14	Tambora	1.800	7.100	8.000	1.400	18.300
15	Bolo	8.100	4.400	8.394	7.457	28.351
16	Soromandi	1.200	3.900	5.050	15.052	25.502
17	Lambitu	100	450	1.700	1.140	3.390
18	Palibelo	2.300	400	3.250	900	6.850
Total		41.086	96.712	174.242	164.391	438.940
%		8,63	20,3	34,5	36,57	100

Sumber : BPN Kab.Bima



Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, sebagian besar wilayah Kabupaten Bima berada pada kemiringan lereng yang sangat curam, di mana 36,57% wilayah Kabupaten Bima berada pada kemiringan lebih dari 40%, 34,50% berada pada kemiringan 16-40%, hanya 8,63% yang berada pada kemiringan 0-2%.

- **Geologi**

Struktur geologi wilayah Kabupaten Bima terdiri dari jenis batuan :

1. Batuan endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir, lempung tana bersusun andesit biasanya jenis batuan ini menyebar dari daerah pegunungan sampai ke pantai;
2. Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api tua;
3. Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat (Qc), yang terdapat di daerah pantai;
4. Bantuan terobosan merupakan batuan terobosan yang mempunyai susunan batuan yang tidak dapat dibedakan dan menerobos batuan hasil endapan gunung api, penyebarannya terdapat di daerah Bolo dan Monta.

Tabel 1.3

Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bima

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	31,464	70,07
2.	Regosol	98,934	22,02
3.	Litosol	179,481	40,31
4.	Mediteran	116,064	26,07
5.	Lain-lain	19,307	4,34

Sumber: BPS Kab. Bima dikutip dari Perda RTRW kab. Bima Tahun 2021-2025.

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa penyebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

1. Litosol

Jenis tanah ini dicirikan oleh kedalaman efektif tanah sangat dangkal dan langsung berada di atas batuan dan umumnya berada pada daerah pegunungan/perbukitan dengan kemiringan yang terjal (> 40 %). Untuk



pengembangan, faktor penghambat jenis tanah ini adalah kedalaman efektif tanah yang dangkal dan lereng.

2. Mediteran

Jenis tanah ini terbentuk pada wilayah berombak sampai bergelombang, mempunyai kedalaman efektif relatif dalam, drainase baik dan terbentuk pada itilin mediteran tekstur halus untuk pengembangan pertanian jenis tanah ini potensial untuk dikembangkan tanaman perkebunan/tanaman keras.

3. Regosol

Tanah ini terbentuk dari batuan induk muda hasil letusan gunung berapi, dicirikan oleh adanya batuan yang menyebar baik dipermukaan tanah maupun pada lapisan tanah bagian atas. Tanah Regosol mempunyai drainase tanah sangat cepat sehingga tidak potensial untuk pengembangan pertanian. Tanah ini dapat meresapkan air cukup sehingga dapat difungsikan sebagai kawasan lindung untuk resapan air. Di wilayah Bima tanah Regosol merupakan hasil letusan gunung api Tambora, sehingga sebarannya sekitar Gunung Tambora.

4. Aluvial

Tanah Aluvial merupakan tanah muda hasil endapan. Tanah ini mempunyai sifat kimia dan fisik relatif baik dari pada ke 3 jenis di atas. Di wilayah Kabupaten Bima jenis tanah ini menyebar di wilayah sekitar (mulai dari wilayah perlembaban). Dalam pemanfaatan jenis tanah ini merupakan lahan potensial untuk pengembangan tanaman pangan.

- **Hidrologi**

Wilayah Kabupaten Bima memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran antara 4 sampai 77 km. Adapun sungai-sungai yang sudah dimanfaatkan untuk irigasi dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4

Sungai-Sungai Yang Mengairi Daerah Irigasi di Kabupaten Bima

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Baku (Ha)
1	Sori Lamoti	22,37	Lebo	Madapangga	623



No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Baku (Ha)
			Keru Woro	Madapangga	120
2	Sori Bamba	6,14	Embung Woro	Madapangga	452
3	Sori Seli	15,27	Mori Rade	Madapangga	307
4	Sori Dena	4,81	La Keda	Madapangga	75
5	Sori Pangga	5,15	Madapangga	Madapangga	459
			Madapangga II		2.000
			Ncangkai Ncoha		1.672
6	Sori Lante	7,09	Mboda	Bolo	125
			Mpungga	Bolo	75
7	Sori Mboda	15,93	Salampe	Bolo	82
8	Sori Campa	4,151	Bendung	Bolo	505
			Bontokape		
9	Sori Lantule	9,28	Mada Palama	Donggo	100
10	Sori Keraku	12,86	Rora Kecil	Donggo	601
11	Sori Nae	15,84	Sori Monca	Donggo	300
12	Sori Ndano Rangga	7,73	Ndano Rangga	Donggo	520
13	Sori Diwujarah	7,03	Diwu Tangiri	Soromandi	500
			Pelaparado	Parado	4.815
14	Sori Ncanga	8,11	Sori Ncanga Parado	Parado	100
15	Sori Madokambo	8,11	Tolotangga	Parado	485
16	Sori Nae	6,29	Bendung So Nae	Monta	275
17	Sori Nari	8,82	Bendung Ina Kece	Monta	165
18	Sori Peto	3,31	Bendung Peto	Monta	300
19	Sori Nae	8,93	Embung Waworada	Langgudu	125
20	Sori Nganco	4,7	Diwu Sadundu	Langgudu	900
21	Sori Rabakalo	5,97	La Kalo	Langgudu	160
22	Sori Nggira	7,54	Embung Nggira I	Langgudu	25
			Embung Nggira II	Langgudu	35
			Ompu Sao	Langgudu	160
23	Sori Na'e	19,626	Potu	Lambu	75
24	Sori Ta'alapa	60,66	Lati	Sape	150
25	Sori Pai	10,43	Sari	Sape	622
26	Sori Pai	10,43	Kakumi	Sape	150
27	Sori Jangka	73,91	Rababou	Sape	368
28	Sori Jangka	73,91	Wuwu	Sape	346
29	Sori Ntimu	77,28	E. Kowo	Sape	220
			Sumi Sape	Sape	2.650
30	Sori Oi Wobo	7,64	Sambu	Wawo	100



No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Baku (Ha)
31	Sori Bombo	10,31	Leka	Palibelo	350
			Karanu Ntonggu	Palibelo	566
32	Sori Lewindede	6,87	So Wuwu	Palibelo	150
33	Sori Teke	5,16	La Fanda	Palibelo	75
34	Sori Lapasariuru	7,13	Embung Roi	Belo	782
			Cenggu	Belo	50
35	Sori Nae	7,046	Tonggondoa Ngali	Belo	750
			Embung Ncera	Belo	329
36	Sori Keli	7,16	Nggaro Rangga	Ambalawi	150
37	Sori Bonto	8,521	Lumba	Ambalawi	150
38	Sori Nae	19,343	Nggeru Wera	Wera	128
			Nae Wera	Wera	600
			Tolakanda Wera	Wera	130
39	Sori Kanahi	6,48	Embung Oi Tui	Wera	228
			Tolakanda Wera	Wera	130
40	Sori Wora	9,028	Mpungga	Wera	75
41	Sori Nae	8	Sori Kenanga	Tambora	500
42	Sori Saro	7,186	Bendung Oi Saro	Sanggar	90
43	Sori Towan	4,1	Bendung Oi Kawa	Sanggar	300
44	Sori Balambon	13,54	Embung Kore	Sanggar	125
45	Sori Kedi	1,201	Taloko	Sanggar	341
46	Sori Mbaju	8,57	Tuta Rasa	Woha	63
47	Sori Keli	12,711	Doro Lopi	Woha	253
			Samampi	Woha	150
			Amakari	Woha	150

Sumber : Dinas PUPR Kab. Bima, 2025

Luas areal irigasi Kabupaten Bima terdiri dari Lahan Baku 17.730 Ha, Lahan Potensial 6.719 Ha. Areal irigasi terluas adalah Kecamatan Madapangga yaitu Baku Sawah seluas 2.286 Ha, sedangkan irigasi dengan luas terkecil di Kecamatan Wawo yaitu Baku Sawah seluas 100 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5



Tabel 1.5
Luas Areal Irigasi Kabupaten Bima Tahun 2025

No.	Nama Daerah Irigasi (D.I.)	Luas Area		
		Baku (Ha)	Potensial (Ha)	Fungsional (Ha)
1	Kec. Madapangga	2.286	887,92	753
2	Kec. Bolo	712	414	379
3	Kec. Donggo	2.021	781	783
4	Kec. Sanggar	856	227	227
5	Kec. Monta	1.400	467,56	503
6	Kec. Woha	691	371	400
7	Kec. Belo	1.911	1.110	1.064
8	Kec. Wera	1.561	518	317
9	Kec. Ambalawi	300	26,47	150
10	Kec. Sape	1.856	792,45	592
11	Kec. Lambu	125	10,46	75
12	Kec. Wawo	100	66	100
13	Kec. Langgudu	1405	150	150
14	Kec. Tambora	500	54	500
15	Kec. Palibelo	1.436	771,36	583
16	Kec. Parado	210	68	210
17	Kec. Lambitu	-	-	-
18	Kec. Soromandi	-	-	-
JUMLAH		17.730	6.719	6.719

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2025

- **Klimatologi**

Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidth dan Ferguson, 1951). Musim hujan relatif pendek, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 83 mm dengan hari hujan 6 hari/Tahun. Selain curah hujan tahunan yang relatif kecil, penyebarannya pun juga tidak merata di mana bulan Mei-Oktober merupakan bulan yang jarang terjadi hujan. Curah hujan di Kabupaten Bima terjadi sepanjang Tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 263 mm³ dengan 6 (enam) hari hujan dalam kurun waktu satu bulan. Untuk curah hujan dengan intensitas terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan hanya 39 mm³. Pada bulan Agustus jumlah hari hujan rata-rata hanya 6 (enam) hari dalam sebulan.



- Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu dan kelembaban udara pada pagi hari mencapai rata-rata 26^o C, Suhu udara siang hari antara 28 – 32^oC, sementara pada sore hari rata-rata 27,6^o C.

c. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima jumlah penduduk Kabupaten Bima pada akhir Tahun 2025 sebanyak 545.571 Jiwa yang terdiri dari 273.256 laki-laki dan 272.315 perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Bima dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Bima
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Monta	20.910	20.979	41.889
2	Bolo	27.148	27.308	54.456
3	Woha	27.129	26.449	53,578
4	Belo	14,441	14,792	29.233
5	Wawo	9,930	10.153	20.083
6	Sape	32.330	32.085	64.415
7	Wera	17.593	17.341	34.934
8	Donggo	10.397	10.749	21.146
9	Sanggar	7.598	7.439	15.037
10	Ambalawi	11.235	10.962	22.197
11	Langgudu	16.449	16.613	33.062
12	Lambu	22.066	21.657	43.723
13	Madapangga	16.399	16.726	33.125
14	Tambora	4.636	4.270	8.906
15	Soromandi	10.547	10.320	20.867
16	Parado	5.735	5.633	11.368
17	Lambitu	3.493	3.354	6.847
18	Palibelo	15.220	15.485	30.705
Jumlah		273.256	272.315	545.571

Sumber Data : DKB semester I Tahun 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada kecamatan Sape sebanyak 64.415 Jiwa dan jumlah penduduk yang sedikit terdapat pada kecamatan lambitu sebanyak 6.847 Jiwa.

2. Jumlah Kepemilikan KTP-EL

Adapun jumlah kepemilikan KTP-EL pada wajib KTP-El yang telah rekam yang di rinci per Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP-EL yang telah rekam yang di rinci per Kecamatan di Kabupaten Bima Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas	Memilik KTP-el	Belum memiliki KTP - el	Persentase (%)
1	Monta	30.681	28.668	1.463	93,44
2	Bolo	39.333	37.584	1.074	95,55
3	Woha	38.579	36.337	1.587	94,19
4	Belo	21.211	20.049	759	94,52
5	Wawo	14.654	13.989	474	95,46
6	Sape	45.741	42.427	2.085	92,75
7	Wera	25.162	23.849	758	94,78
8	Donggo	15.191	14.287	605	94,05
9	Sanggar	10.897	10.153	452	93,17
10	Ambalawi	16.681	15.825	523	94,87
11	Langgudu	23.861	22.260	133	92,29
12	Lambu	31.706	29.027	1.373	91,55
13	Madapangga	24.786	23.753	799	95,83
14	Tambora	6.277	5.585	502	88,98
15	Soromandi	14.699	13.710	624	93,27
16	Parado	8.150	7.596	381	93,20
17	Lambitu	4.700	4.371	191	93,00
18	Palibelo	22.223	21.076	694	94,84
Jumlah		394.532	370.546	15.477	93,92

Sumber Data : DKB Semester I Tahun 2025.



Dari tabel di atas dapat di lihat berdasarkan jumlah penduduk wajib KTP elektronik dengan realisasi tertinggi perekaman terdapat di Kecamatan Madapangga dengan jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas 24.786 yang memiliki KTP-el 23.753 dan yang Belum memiliki KTP-el 799 atau 95,83% sedangkan kecamatan yang masih kurang yaitu kecamatan Tambora dengan jumlah penduduk 6.277 wajib ktp elektronik sebanyak 5.585 dan yang belum memiliki KTP elektronik 502 atau 88,98%.



Tabel 1.8

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

No	KECAMATAN	UMUR																Jumlah Penduduk
		00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75	
1.	Monta	2.242	3.965	3.531	3.563	3.749	3.668	3.070	2.960	3.059	2.816	2.432	1.954	1.419	1.357	726	1.378	41.889
2.	Bolo	3.341	4.871	4.694	4.628	4.616	4.420	3.721	3.930	3.983	3.663	3.270	2.613	1.876	1.828	1.172	1.830	54.456
3.	Woha	3.060	5.104	4.738	4.842	4.743	4.632	3.775	4.041	3.825	3.468	3.089	2.423	1.760	1.594	940	1.544	53.578
4.	Belo	1.500	2.656	2.423	2.520	2.450	2.448	2.200	2.213	2.263	1.993	1.572	1.326	918	1.029	610	1.112	29.233
5.	Wawo	1.227	1.825	1.640	1.645	1.538	1.557	1.518	1.491	1.366	1.239	1.090	1.041	923	717	480	786	20.083
6.	Sape	3.978	6.316	5.746	5.693	5.712	5.546	5.004	4.906	4.675	4.044	3.372	2.725	2.007	2.021	1.157	1.517	64.415
7.	Wera	2.246	3.276	2.953	3.100	2.801	3.151	2.692	2.573	2.266	1.944	1.834	1.718	1.367	1.218	704	1.091	34.934
8.	Donggo	1.168	2.166	1.758	2.053	1.913	1.951	1.659	1.481	1.401	1.286	1.101	1.004	674	600	328	603	21.146
9.	Sanggar	843	1.476	1.269	1.327	1.324	1.360	1.237	1.089	992	1.008	881	759	460	397	240	375	15.037
10.	Ambalawi	1.322	1.761	1.638	1.575	1.713	1.978	1.944	1.825	1.694	1.446	1.312	1.143	799	951	444	652	22.197
11.	Langgudu	1.992	3.223	2.764	3.068	3.075	2.906	2.621	2.330	2.107	2.020	1.782	1.895	1.195	1.021	503	960	33.062
12.	Lambu	2.571	4.042	3.750	3.976	3.956	4.133	3.489	3.503	3.237	2.731	2.012	1.900	1.283	1.456	696	988	43.723
13.	Madapangga	1.751	2.863	2.595	2.653	2.582	2.461	2.321	2.618	2.493	2.246	1.972	1.706	1.330	1.297	851	1.386	33.125
14.	Tambora	460	943	826	990	883	754	586	597	609	631	492	406	252	192	130	155	8.906
15.	Soromandi	1.437	2.131	1.869	1.934	1.874	1.825	1.698	1.550	1.399	1.150	1.057	881	726	516	293	527	20.867
16.	Parado	661	1.080	1.022	1.075	1.011	944	784	756	749	746	645	510	368	399	200	418	11.368
17.	Lambitu	528	754	570	560	503	594	536	498	384	345	321	305	277	254	171	247	6.847
18.	Palibelo	1.873	2.817	2.634	2.631	2.409	2.251	2.235	2.325	2.280	1.922	1.616	1.432	1.223	1.176	658	1.223	30.705
Jumlah		32.196	51.269	46.420	47.833	46.852	46.579	41.090	40.686	38.728	34.698	29.850	25.341	18.857	18.032	10.303	16.792	545.571

Sumber Data: DKB semester I 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk dengan umur yang terbanyak terdapat pada umur 05-09 tahun sebanyak 51.269 jiwa dan jumlah penduduk dengan jumlah umur yang paling sedikit terdapat pada umur 70-74 Tahun sebanyak 10.303 Jiwa.

d. Jumlah Kecamatan

Kabupaten Bima mempunyai 18 Kecamatan dan penduduk sebanyak 541.319 jiwa. Berikut jumlah kecamatan dan jumlah penduduk Kabupaten Bima Tahun 2025

Tabel 1.9
Jumlah Kecamatan dan penduduk Kabupaten Bima Tahun 2025

No	Kecamatan	2025
1	Monta	41.889
2	Bolo	54.456
3	Woha	53.578
4	Belo	29.233
5	Wawo	20.083
6	Sape	64.415
7	Wera	34.934
8	Donggo	21.146
9	Sanggar	15.037
10	Ambalawi	22.197
11	Langgudu	33.062
12	Lambu	43.723
13	Madapangga	33.125
14	Tambora	8.906
15	Soromandi	20.867
16	Parado	11.368
17	Lambitu	6.847
18	Palibelo	30.705
Jumlah		545.571

Sumber Data : DKB Semester I Tahun 2025.



e. Kepegawaian

Perkembangan pegawai Kabupaten Bima menurut sumber data Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Bima hasil perhitungan akhir tahun 2025 adalah sejumlah 6.138 orang yang di rincikan sebagai berikut :

a. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 Orang	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	469 Orang	
	Pembina Tk. I (IV/b)	711 Orang	
	Pembina (IV/a)	986 Orang	
2	Penata Tk. I (III/d)	1.112 Orang	
	Penata (III/c)	672 Orang	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	986 Orang	
3	Penata Muda (III/a)	692 Orang	
	Pengatur Tk. I (II/d)	296 Orang	
	Pengatur (II/c)	146 Orang	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	46 Orang	
4	Pengatur Muda (II/a)	15 Orang	
	Juru Tk. I (I/d)	5 Orang	
	Juru (I/c)	1 Orang	
	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	
	Juru Muda (I/a)	-	
Jumlah Keseluruhan		6.138 Orang	

b. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bima

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata III (S-3)	4 Orang	
2	Strata II (S-2)	259 Orang	
3	Strata I (S-1)	4.170 Orang	
4	Diploma IV (D-IV)	113 Orang	
5	Diploma III (D-III)	692 Orang	
6	Diploma II (D-II)	109 Orang	
7	Diploma I (D-I)	18 Orang	
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	757 Orang	
9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	14 Orang	
10	Sekolah Dasar (SD)	2 Orang	
JUMLAH KESELURUHAN		6.138 Orang	



c. - Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – Laki : 3.002 Orang

Perempuan : 3.136 Orang

- Jumlah Pegawai PPPK 6.205 (penuh waktu) dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – Laki : 2.382 Orang

Perempuan : 3.823 Orang

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Total **Pendapatan Daerah** per 31 Desember 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2.081.414.946.120,00 terealisasi sebesar Rp. 2.060.845.464.701,62 atau 99,01%. rincian pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.220.092.202.270,00 dengan realisasi sebesar Rp.209.464.399.777,62 atau 95,17%

a. **Pajak Daerah** ditargetkan sebesar Rp. 42.085.649.257,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.786.367.464,91 atau 85,03%

b. **Retribusi Daerah** ditargetkan sebesar Rp. 155.006.553.013,00 dengan realisasi sebesar Rp. 156.388.618.965,90 atau 100,89%

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** ditargetkan sebesar Rp. 7.510.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.443.342.308,00 atau 112,43%.

d. **Lain-lain PAD yang sah** ditargetkan sebesar Rp.15.490.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.846.071.038,81 atau 57,11%.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.834.998.222.557,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.825.056.543.631,00 atau 99,46% dengan rincian sebagai berikut :



- a. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.769.595.187.000,00 dengan realisasi Rp. 1.760.720.762.880,00 atau 99,50%.
1. **Dana Bagi Hasil** di targetkan sebesar Rp. 103.870.024.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.288.736.300,00 atau 98,48%.
 2. **Dana Alokasi Umum (DAU)** di targetkan sebesar Rp.1.130.073.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.160.437.521.669,00 atau 102,69%.
 3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)** di targetkan sebesar Rp.355.055.442.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.343.896.238.731,00 atau 96,86%.
 4. **Dana Desa** di targetkan sebesar Rp. 180.596.441.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 154.098.266.180,00 atau 99,50%.
- b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah** Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 65.403.035.557,00 dengan realisasi Rp.64.335.780.751,00 atau 98,37%. Dengan rincian sebagai berikut:
1. **Pendapatan Bagi Hasil** ditargetkan sebesar Rp.65.403.035.557,00 dengan realisasi Rp. 64.144.780.751,00 atau 98,08%.
 2. **Bantuan Keuangan** ditargetkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 191.000.000,00 atau 100,00%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 26.324.521.293,00 dengan realiasi Rp. 26.324.521.293,00 atau 100%
- **Pendapatan Hibah** ditargetkan sebesar Rp. 26.324.521.293,00 dengan realisasi Rp. 26.324.521.293,00 atau 100%.
3. **Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**
- Total **anggaran belanja** per 31 Desember tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.2.120.341.439.656,96 terealisasi sebesar



Rp.2.032.136.514.517,19 atau mencapai sebesar 95,84%, rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi** sebesar Rp.1.620.643.248.454,86 dengan realisasi sebesar Rp. 1.578.755.264.319,19 atau 97,42% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Belanja Pegawai** sebesar Rp. 1.083.594.408.101,86 dengan realisasi Rp. 1.061.267.729.426,00 atau 97,94%
 - b. **Belanja Barang dan Jasa** sebesar Rp. 505.098.630.353,00 dengan terealisasi Rp. 486.917.890.178,19 atau 96,40%
 - c. **Belanja Hibah** sebesar Rp 31.499.210.000,00 dengan realisasi Rp 30.118.644.715,00 atau 95,62%
 - d. **Belanja Bantuan Sosial** sebesar Rp. 451.000.000,00 dengan realisasi Rp. 451.000.000,00 atau 100%.

2. **Belanja Modal** sebesar Rp.181.580.744.245,80 dengan realisasi Rp. 163.400.626.644,00 atau 89,99% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Belanja Modal Tanah** sebesar Rp. 276.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.273.738.000,00 atau 99,00%.
 - b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** sebesar Rp.39.525.733.415,80 dengan realisasi Rp. 36.409.075.917,00 atau 92,11%.
 - c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** sebesar Rp.80.385.336.167,00 dengan realisasi Rp. 69.983.660.311,00 atau 87,06%.
 - d. **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** sebesar Rp.53.730.804.468,00 dengan realisasi Rp. 49.141.375.675,00 atau 91,46%.
 - e. **Belanja Modal Aset Tetap lainnya** sebesar Rp. 7.662.370.195,00 dengan realisasi Rp. 7.592.776.741,00 atau 99,09%.

1. **Belanja Tak Terduga** sebesar Rp.4.500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 3.938.150.000,00 atau 87,51%.



2. **Belanja Transfer** sebesar Rp.313.617.446.956,30 dengan realisasi Rp. 286.042.473.554,00 atau 91,21%.
 - a. **Belanja bagi hasil** Rp. 5.750.828.136,30 dengan realisasi Rp.4.461.882.960,00 atau 77,59%.
 - b. **Belanja bantuan keuangan** sebesar Rp. 307.866.618.820,00 dengan realisasi Rp. 281.580.590.594,00 atau 91,46%

4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Pembiayaan

- a. Penerima pembiayaan daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.39.926.493.536,96 terealisasi sebesar Rp. 39.929.972.000,96 atau 100,01%
- b. Realisasi Belanja Menurut Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,00 atau 20%.

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Visi dan Misi Kabupaten Bima

Pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025–2029. Penetapan visi dan misi dimaksudkan agar kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bima, dilaksanakan lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang.

Visi

Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.



Berdasarkan uraian di atas, maka cita – cita pembangunan Kabupaten Bima selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

“Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”

Perumusan dan penjelasan lebih lanjut terhadap Visi dimaksud dijabarkan dalam pokok-pokok visi sebagai berikut:

3. **Bermartabat:** Makna “Bermartabat” memiliki arti bahwa Kabupaten Bima memiliki karakter dan kualitas sehingga dihargai, dihormati dan memiliki masyarakat Yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan.
4. **Berkemajuan:** Makna "Berkemajuan" memiliki arti bahwa Kabupaten Bima memiliki sumberdaya manusia yang berdaya saing, inovatif, adil, dan modern dengan berlandaskan pendidikan berkualitas tinggi. Kondisi Kabupaten Bima pada tahun 2029 diharapkan memiliki kualitas sumber daya manusia yang berada pada posisi lebih tinggi secara nasional dan memiliki kompetensi dan daya saing pada skala global dengan didukung kapasitas penguasaan teknologi, sehingga menjadi *role model* pembangunan untuk daerah lain. Kondisi maju ini diwujudkan dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan dan budaya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata;
5. **Makmur:** Makna "Makmur" adalah upaya untuk mewujudkan kondisi yang memperlihatkan masyarakat hidup dengan berkecukupan dan merata. Untuk mewujudkan kondisi makmur dan sejahtera, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sehingga perlu tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, masyarakat sejahtera juga mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat makmur dan sejahtera, tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu, yang setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang



sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan bersama.

6. **Tangguh:** Makna "Tangguh" adalah upaya Kabupaten Bima dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
7. **Berkelanjutan:** Makna "Berkelanjutan" merupakan upaya Kabupaten Bima dalam meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Hal ini meliputi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, tercipta lingkungan yang ramah, ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Kabupaten Bima bertekad menjadi sebuah wilayah yang mengutamakan keunggulan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan kondisi berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Sehingga perlu pembangunan berkelanjutan diterapkan.

Misi

Visi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yakni:

1. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil**

Aparatur merupakan aktor utama dalam pembangunan maka aparatur pemerintah harus berkualitas dengan didukung oleh sistem tata kelola yang berkualitas sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah. Prinsip tata kelola yang telah diakui mampu memberikan pengaruh positif adalah prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* yaitu *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus oriented; equity; effectiveness dan efficiency; dan accountability*.



2. Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing

Membangun manusia yang sehat dan cerdas menjadi modal utama dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Bima. Sumber daya manusia yang unggul, memiliki karakter, dan daya saing tinggi menjadi representasi dari potensi manusia di Kabupaten Bima yang sehat, cerdas, dan dididik sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta luhur kebudayaan setempat. Sukses dalam mencapai misi ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan perkembangan manusia di Kabupaten Bima. Dalam konteks ini, fokus misi melibatkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan mengutamakan pembangunan manusia Kabupaten Bima menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mencapai visi pembangunan yang lebih maju. Pendidikan yang berkarakter, sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan lokal, menjadi fondasi yang kuat untuk mencetak generasi muda yang berdaya saing. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Bima dapat menikmati kesejahteraan fisik dan mental yang optimal. Dengan demikian, fokus pada Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencerminkan komitmen Kabupaten Bima untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusianya.

3. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Sarana prasarana atau infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian maupun pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Bima. Sarana dan prasarana berkualitas dan adaptif adalah infrastruktur yang dirancang dan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang muncul seiring waktu. Infrastruktur dalam kondisi mantap mengacu pada keadaan di mana fasilitas



atau sarana publik yang termasuk dalam kategori infrastruktur berada dalam keadaan baik, terawat dengan baik, dan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Namun dalam pemanfaatan infrastruktur, infrastruktur yang berkualitas dan adaptif juga memperhitungkan dampak lingkungan dari pembangunan dan operasinya. Pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada serta fungsi ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang agar pembangunan infrastruktur dapat mendorong aspek keberlanjutan. Adapun urusan yang menjadi fokus dalam misi ini yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan

Kemandirian Ekonomi merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dengan pihak lain. Kemandirian ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai misi ini dapat diukur melalui indikator-indikator seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Fokus utama, yaitu Misi 4, mencakup sektor-sektor kunci seperti tenaga kerja; pariwisata; penanaman modal; koperasi, usaha kecil, dan menengah (UKM), perdagangan; perindustrian; pangan; pertanian; serta kelautan dan perikanan. Potensi ekonomi dan sumber daya lokal menjadi pusat perhatian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Misi 4 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan, memajukan sektor pariwisata untuk mengoptimalkan daya tarik wisata lokal, serta memberikan dorongan kepada penanaman modal dan perkembangan usaha kecil dan menengah. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan peningkatan produksi daerah dan mendukung pertumbuhan UKM. Perdagangan, perindustrian, pertanian, serta sektor



kelautan dan perikanan menjadi elemen-elemen penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bima. Fokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk lokal merupakan strategi untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Dengan demikian, melalui penekanan pada potensi ekonomi dan sumber daya lokal, misi ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya

Untuk membangun kapasitas pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak adalah sebuah langkah penting dalam membangun dasar pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Melalui misi ini, Kabupaten Bima berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang setiap individu diperlakukan dengan menghargai dan melindungi hak-hak asasinya, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan keberlanjutan daerah. Fokus utama misi ini meliputi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan hidup dengan upaya akan difokuskan pada aspek-aspek keagamaan, kebudayaan dan elemen-elemen pemerintahan umum, serta lingkungan hidup. Dalam konteks misi ini, Kabupaten Bima mengusung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi utama untuk membangun masyarakat yang berakhlak. Langkah-langkah akan diarahkan pada memastikan bahwa setiap warga mendapat perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasarnya. Melalui penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Kabupaten Bima berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi semua warganya. Fokus misi ini juga memperhatikan aspek sosial dan pemerintahan umum sebagai bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aman, harmonis dan berakhlak. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan



memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan, Kabupaten Bima berharap dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dampak lingkungan seperti kebencanaan menjadi perlu perhatian khusus dengan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana. Diperlukan pula kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, masyarakat, organisasi lain, dan swasta dalam aspek adaptasi dan ketahanan bencana

Keselaran misi antara tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Bima memiliki peran yang krusial dalam mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Pada tingkat nasional, misi pembangunan seringkali mencakup arah strategis dan visi bersama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya keselaran ini, pemerintah pusat dapat memberikan panduan dan dukungan yang konsisten dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di provinsi dan kabupaten.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tingkat *intermediate* antara nasional dan Kabupaten Bima memiliki peran penting dalam mengimplementasikan misi pembangunan nasional dan menyesuakannya dengan kebutuhan lokal. Keselaran antara misi provinsi dengan nasional menciptakan sinergi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang merata di seluruh NTB. Dengan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional ke dalam konteks regional, Provinsi NTB dapat memastikan bahwa setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Bima, memiliki arah yang sejalan dengan misi nasional dan mendukung visi keseluruhan pembangunan regional.

Pentingnya keselaran misi juga sangat terasa di tingkat Kabupaten Bima. Dengan memahami dan merangkum misi nasional dan Provinsi NTB,



pemerintah kabupaten dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan visi nasional dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Keselarasan ini membuka peluang untuk pemanfaatan sumber daya secara optimal, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bima.

b. Program Prioritas

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Bima, RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025, RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi NTB, permasalahan di Kabupaten Bima, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, Kabupaten Bima menyusun tema pembangunan untuk RKPD Tahun 2025 sebagai berikut mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui hilirisasi komoditas unggulan

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Bima telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing;
3. Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Pendukung Kawasan strategis;
4. Kemandirian ekonomi berbasis Kawasan strategis dan komoditas unggulan;
5. Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai social budaya berbasis lingkungan;



1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam peraturan pemerintah dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis layanan SPM. Pengaturan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan serta merupakan barang dan/atau jasa yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.



Mekanisme penerapan SPM dilaksanakan melalui: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang seluruhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan teknis kementerian terkait. Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Penetapan prioritas tersebut, diikuti dengan implementasi penerapan layanan SPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan wujud atas penjaminan hak konstitusional warga negara. Sehingga, terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan ketentuan penerapan SPM merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, SDM, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing didalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat dari penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara akan pemenuhan hak dasarnya agar terpenuhi supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri kedepannya, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pihak swasta,



lembaga atau masyarakat didalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

Laporan pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial akan diuraikan pada BAB IV.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis



- Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);



b. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi. Diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bima menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan



mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

c. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kondisi makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Bima
Tahun 2024 s.d 2025

Kondisi Makro	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	70,99	71,99

Sumber : BPS, Kabupaten Bima 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,99 persen dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 71,99 persen.

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bima selalu mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terkait sumber daya manusia oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Kabuapten Bima



b. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bima, angka Kemiskinan pada Tahun 2024 di Kabupaten Bima sebesar 13,88 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2025 12,59 persen. Hal ini menunjukkan ada upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam mengurangi angka kemiskinan di antaranya memberikan bantuan sosial dan subsidi, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

c. Angka Pengangguran

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Daerah maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya kondisi tingkat pengangguran di Kabupaten Bima berikut ini:

Angka pengangguran hingga pada tahun 2025 ditunjukkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Angka Pengangguran di Kabupaten Bima
Tahun 2024 – 2025

Tahun	2024	2025
Angka Pengangguran	2,19	2,13

Sumber data : BPS Kabupaten Bima 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Angka Pengangguran Kabupaten Bima senantiasa mengalami penurunan, pada tahun 2024 berada pada level 2,13% sedangkan pada tahun 2025 mengalami penueunan pada level 2,13%.

Pemerintah Kabupaten Bima masih terus berupaya dalam peningkatan sumber daya yang ada, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau dikenal dengan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran.



d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima berikut ini:

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima
Tahun 2024 - 2025

Tahun	2024	2025
Pertumbuhan	2,82	3,22

Sumber: BPS Kabupaten Bima 2025

Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima pada 2024 2,82 persen meningkat 3,22 persen di tahun 2025.

e. PDRB Per Kapita Harga berlaku

Pendapatan per kapita merupakan standar yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Istilah ini seringkali disebut dengan pendapatan rata-rata penduduk. Dimana, pendapatan rata-rata ini sekaligus gambaran dari Produk Domestik Bruto per Kapita (PDM).

PDRB atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan dari tahun 2024 14.756,77. Dan tahun 2025 15.612,85

Dalam penentuan PDRB di pengaruhi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengeluaran pemerintah daerah dan tenaga kerja.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Kabupaten Bima pada tahun 2024 sebesar 0,358 mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 0,326 Penurunan



di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan kebijakan fiscal.



2.2 . Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

2.2..1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Tabel 2.4

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini : 18.314- Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan : 20.182- Capaian kinerja : 90,74%	Dapodik
			<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang belajar di satuan	Dapodik



	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	pendidikan dasar : 86.424 - Jumlah anak usia 7-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan : 87.077 - Capaian kinerja : 99,25%	
	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan pendidikan	- Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : 149 - Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah : 212 - Caaian kinerja : 70,28%	Dapodik
	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	- Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik : 439 - Jumlah seluruh toilet : 1.292 - Capaian kinerja : 33.98%	Dapodik
	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	- Jumlah ruang kelas Sekolah DAsar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik : 1.007 - Jumlah ruang kelas : 3.611 - Capaian kinerja : 27.89%	Dapodik



2. Urusan Kesehatan

Tabel 2.5
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kematian ibu tahun 2025 : 12- Jumlah ibu melahirkan tahun 2025 : 7.854- Capaian kinerja : 0.15%	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu : 3.993- Jumlah balita usia 0-59 bula yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama : 3.993- Capaian kinerja : 10.67%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standard di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (nominator) : 9.011	Dinas Kesehatan



ibu hamil sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama : 9.280- Capaian kinerja : 97.10%	
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun : 9.280- Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama : 9.280- Capaian kinerja : 100.00%	Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standard dalam kurun waktu satu tahun : 7.816- Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama ; 8.838- Capaian kinerja : 88.44%	Dinas Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan	Dinas Kesehatan



Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard 2 + Jumlah Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standard 3 : 34.996</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten pada kurun waktu satu tahun yang sama : 43.526- Capaian kinerja : 80.40%	
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran : 67.965- Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama : 78.721- Capaian kinerja : 86.34%	Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standard dalam kurun waktu satu tahun : 263.575- Jumlah orang usia 15-59 tahun di	Dinas Kesehatan



		<p>kabupaten dalam waktu satu tahun : 317.431</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian kinerja : 83.03%	
	<p>Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penduduk berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (nominator) : 58.787- Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama (penyebut) : 59.413- Capain kinerja : 98.95%	Dinas Kesehatan
	<p>Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun : 290- Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama : 39.905- Capain kinerja : 0.73%	Dinas Kesehatan
		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Dinas Kesehatan



Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	<p>standar dalam kurun waktu satu tahun : 4.066</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerja kabupaten berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama : 7.994- Capaian kinerja : 50.86%	
Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun : 507- Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama : 1.434- Capaian kinerja : 35.36%	Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan orang tak terduga Tuberkulosis sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah orang yang tidak terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun : 6.784- Jumlah perkiraan orang yang tidak terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama : 7.277	Dinas Kesehatan



			- Capaian kinerja : 93.23%	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang meningkatkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun : 10.888- Jumlah orang yang berisiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten dalam jangka waktu satu tahun yang sama : 11.216- Capaian kinerja : 97.08%	Dinas Kesehatan



3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.6

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Ha) : 6.719- Luas daerah irigasi kewenangan kabupateN (Ha) : 13.370- Capaian kinerja : 38.68%	Dinas PUPR
		Persentase kemantapan jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- (Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten (Km) : 440.94- Panjang jalan kewenangan Kabupaten (Km) : 805.99- Capaian kinerja : 54.71%	Dinas PUPR
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di	Dinas PUPR



		perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten	kabupaten pada tahun 2025 : 228.742 - Jumlah total penduduk kabupaten : 545.571 - Capaian kinerja : 41.93%	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik : 167 - Jumlah rumah di kabupaten : 934 - Capaian kinerja : 17.88%	Dinas PUPR
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	- Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) : - Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko	Dinas PUPR



			<p>bencana banjir (ha)</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian kinerja	
		<p>Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten (Ha)- Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten (Ha)- Capaian Kinerja	Dinas PUPR
		<p>Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya : 102- Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku : 105- Capaian Kinerja : 97.14%	Dinas PUPR
		<p>Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan- Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh	Dinas PUPR



			Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk - Capaian Kinerja	
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	- Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis : 300 - Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten ; 300 - Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas PUPR
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten	- Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun : 27 - Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun : 29 - Capaian Kinerja : 93.10%	Dinas PUPR



4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tabel 2.7

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun 2025 : 25- Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun 2025 : 25- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	<ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun 2025 (Ha) : 0.2591- Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Pekerjaan



			2025 : 25.18 - Capaian Kinerja : 1.03%	Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun 2025 : 60 - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2025 : 60 - Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	- Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025 : 1 - Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025 : 1 - Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.8

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

N O	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun 2025 : 1- Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten = 3 : 3- Capaian Kinerja : 33.33%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani : 177	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



		Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan : 177- Capaian Kinerja : 100.00%	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan : 9- Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi : 9- Capaian Kinerja : 100.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penduduk dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : 300- Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan : 36.636- Capain Kinerja : 0.82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : 41.448- Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana : 41.448- Capaian Kinerja : 100.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap : 87- Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota : 87- Capaian Kinerja : 100.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



6. Urusan Sosial

Tabel 2.9
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : 295- Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti : 1.336- Capaian Kinerja : 22.08%	Dinas sosial
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : 117- Populasi anak terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti : 1.162	Dinas sosial



			<ul style="list-style-type: none">- Capaian Kinerja : 10.07%	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : 492- Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti : 1.855- Capaian Kinerja : 26.52%	Dinas sosial
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : 12- Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti : 82- Capaian Kinerja : 14.63%	Dinas sosial
			<ul style="list-style-type: none">- Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten yang terpenuhi	Dinas sosial



		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	kebutuhan dasarnya : 889 - Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten : 1.039 - Capaian Kinerja : 85.56	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	- Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar : 73.865 - Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten : 81.928 - Capaian Kinerja : 90.16%	Dinas sosial



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.10

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah : 11- Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten : 15- Capaian Kinerja : 73.33%	Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Bappeda dan Perangkat Daerah terkait
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak : 50- Jumlah Perusahaan : 361- Capaian Kinerja : 13.85%	Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Bappeda dan Perangkat Daerah terkait



		Ketenagakerjaan).		
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten- Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten- Capaian Kinerja	Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Bappeda dan Perangkat Daerah terkait



2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.11

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif : 51- Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun) : 51- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif : 34- Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang : 34- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak



3. Urusan Pangan

Tabel 2.12

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten : 13.4- Target jumlah cadangan pangan : 60.92- Capaian Kinerja ; 22.00%	Dinas Ketahanan Pangan



4. Urusan Pertanahan

Tabel 2.13

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
4	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah : 5.830.357- Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah : 7.033.745- Capaian Kinerja : 82.89%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah terkait
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting : 419.022,7- Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah : 438.939- Capaian Kinerja : 95.46%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah terkait
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal : 3- Jumlah Rencana Detail Tata	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berkoordinasi



			Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ; 18 - Capaian Kinerja : 16.67%	dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah terkait
--	--	--	--	---



5. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.14

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
5	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan : 257- Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung : 10- Capaian Kinerja : 2570.00%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan	Dinas Lingkungan Hidup



			sampah : 16.690 - Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten : 145.193 - Capaian Kinerja : 11.50%	
--	--	--	--	--



6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.15

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none">- Akta kelahiran yang diterbitkan : 154.700- Jumlah anak usia 0 – 17 tahun : 158.634- Capaian Kinerja : 97.52%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak : 91.597- Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak : 154.807- Capaian Kinerja : 59.17%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan : 2- 2 dokumen : 2- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah penduduk berumur	Dinas Kependudukan dan



		Penduduk (KTP) elektronik	17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik : 370.546 - Jumlah penduduk 17 tahun ke atas : 394.532 - Capaian Kinerja : 93.92%	Catatan Sipil
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	- Akta kematian yang diterbitkan : 13.995 - Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan : 13.995 - Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	- Akta perkawinan yang diterbitkan : 261.404 - Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan : 261.404 - Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	- Akta perceraian yang diterbitkan : 4.737 - Jumlah penduduk yang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



			mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan : 4.737 - Capaian Kinerja : 100.00%	
--	--	--	--	--



7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.16

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun : Tuntas Hasil 100%- Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2025) : Tuntas Hasil 100%- Capaian Kinerja : Tuntas Hasil 100%	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah
		Persentase peningkatan status desa mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun : 20- Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2025) : 73- Capaian Kinerja : 27.40%	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah



		Persentase fasilitasi kerja sama desa	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku : 61- Jumlah kerja sama desa yang ditangani : 90- Capaian Kinerja : 67.78%	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah
--	--	---------------------------------------	---	--



8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.17

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	<ul style="list-style-type: none">- Total Fertility Rate/TFR kabupaten : 2.61- Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan : 2.4699999999999998- Capaian Kinerja : 105.67%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	<ul style="list-style-type: none">- Total peserta Keluarga Berencana aktif modern : 48.466- Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun : 74.535- Capaian Kinerja : 65.02%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			<ul style="list-style-type: none">- Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten : 6.103 - Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten yang bersangkutan : 5.1 - Capaian Kinerja : 119666.67%	Berencana
--	--	--	--	-----------



9. Urusan Perhubungan

Tabel 2.18

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
9	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- $KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL) : 1$- Capaian Kinerja : 1.00 Rasio	Dinas Perhubungan
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- V/C ratio di jalan Kabupaten : 0.43- Capaian Kinerja : 0.43 Rasio	Dinas Perhubungan
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan : 0- Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata : 9- Capaian Kinerja : 0.00%	Dinas Perhubungan



10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.19

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika : 5- Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah : 51- Capaian Kinerja : 9.80%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : 168- Jumlah Layanan Publik :	Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika



			168 - Capaian Kinerja : 100.00%	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	- Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten : 0 - Jumlah penduduk : 370.568 - Capaian Kinerja ; 0.00%	Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika



11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.20

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	<ul style="list-style-type: none">- Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya : 187.118.538- Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya : 140.311.538- Capaian Kinerja : 33.36	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	<ul style="list-style-type: none">- Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ; 2- Σ Usaha mikro : 2- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



12. Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.21

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
12	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- (Jumlah nilai investasi tahun 2025- Jumlah nilai investasi tahun 2024) di kabupaten : 185.637.245.258- Jumlah nilai investasi tahun 2024 di kabupaten : 439.172.382.349- Capaian Kinerja : -57.73%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Realisasi total terhadap target investasi	<ul style="list-style-type: none">- Total realisasi investasi kabupaten- Target investasi kabupaten yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten yang bersangkutan- Capaian Kinerja : 0.00%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP



13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.22

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
13	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten : 967- Jumlah sasaran pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten : 59- Capaian Kinerja : 1638.98%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah dan Induk Cabang Olahraga.
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten : 49- Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten :	Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah dan Induk Cabang Olahraga.



			129.885 - Capaian Kinerja : 0.04 -	
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	- Jumlah atlet daerah di kabupaten yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi : 73 - Jumlah atlet daerah yang dibina di tingkat kabupaten (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) : 73 - Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah dan Induk Cabang Olahraga.
		Persentase jumlah atlet berprestasi	- Jumlah atlet peraih medali : 31 - Jumlah atlet yang mengikuti event nasional dan internasional: 73 - Capaian Kinerja : 42.47%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah dan Induk Cabang Olahraga.



14. Urusan Statistik

Tabel 2.23

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
14	Statistik	Persentase hadirnya daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah : 1- Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah : 1- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika berkorrdinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi Setda



15. Urusan Persandian

Tabel 2.24

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
15	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi : 228- Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918) : 918- Capaian Kinerja : 24.84%	Dinas Komunikasi dan Informatika



16. Urusan Kebudayaan

Tabel 2.25

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
16	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan : 60- Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan : 60- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kunjungan ke pusat bersejarah tahun 2025 - Jumlah kunjungan ke pusat bersejarah tahun 2024 : 61- Jumlah kunjungan ke pusat bersejarah bersejarah 2024 : 61- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



17. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.26

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
17	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- $TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100 : 67.05$- Capaian Kinerja : 67.05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<ul style="list-style-type: none">- $IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100 : 1.3900000000000001$- Capaian Kinerja : 1.39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	<ul style="list-style-type: none">- $T = (a + i + s + j)/4 : 91.15$- Capaian Kinerja : 91.15%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.27

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	<ul style="list-style-type: none">- Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT : 52.82- Capaian Kinerja : 52.82Kg	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	<ul style="list-style-type: none">- Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) : 269.678,31- Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) : 275.000- Capaian Kinerja : 98.06%	Dinas Kelautan dan Perikanan



2. Urusan Pariwisata

Tabel 2.28

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	<ul style="list-style-type: none">- Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) : 53.105.560.590- Realisasi investasi Tahun 2025 : 185.637.245.285- Capaian Kinerja : 28.61%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah wisatawan asing tahun 2025 – Jumlah wisatawan asing tahun 2024 : 372- Jumlah wisatawan asing tahun 2024 : 355- Capaian Kinerja : 4.79%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
			<ul style="list-style-type: none">- Jumlah wisatawan tahun	Dinas Pariwisata dan



		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	2025 – Jumlah wisatawan tahun 2024 : 41.930 - Jumlah wisatawan tahun 2024 : 38.186 - Capaian Kinerja : 9.80%	Kebudayaan.
--	--	--	--	-------------



3. Urusan Pertanian

Tabel 2.29

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Tahun 2025

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none">- Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 : 857.522- Produksi tanaman pangan tahun N-1 : 891.211- Capaian Kinerja : -3.78%	Dinas Pertanian
		Peningkatan produksi hortikultura	<ul style="list-style-type: none">- Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 : 129.770,37- Produksi hortikultura tahun N-1 : 144.004,62- Capaian Kinerja : -9.88%	Dinas Pertanian
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	<ul style="list-style-type: none">- Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1 : 5.719,25- Produksi komoditas peternakan tahun N-1 :	Dinas Pertanian



			5.055,09 - Capaian Kinerja : 13.14%	
		Persentase wilayah yang terkandung dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	- Luas wilayah yang mengandung penyakit hewan menular strategis tahun ini : 3.583 - Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis : 4.294,71 - Capaian Kinerja : 83.43%	Dinas Pertanian



3. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 2.30

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

NO	URUSAN	INDEKS KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
4	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku : 16- Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten : 5.168- Capaian Kinerja : 0.31%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal
	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	<ul style="list-style-type: none">- Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan : 100- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



		kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten		
		Persentase kehadiran pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional : 22- Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah : 22- Capaian Kinerja : 100.00%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 : 497- Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 : 1.206- Capaian Kinerja : -58.79%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	<ul style="list-style-type: none">- Nilai investasi sektor industry : 36.584.843.333- Total investasi seluruh sector : 185.637.245.285- Capaian Kinerja : 19.71%	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



2.2.4. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Tabel 2.31

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan Tahun 2025

NO	URUSAN	NO	INDEKS KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan		Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan : 17- Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden : 17- Capaian Kinerja : 100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



2. Urusan Perencanaan

Tabel 2.32
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Keuangan Tahun 2025

NO	URUSAN	NO	INDEKS KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Keuangan		Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) : 793.079.172.231,3- Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : 2.120.341.439.656,96- Capaian Kinerja : 37.40%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Realisasi Pendapatan Asli Daerah : 209.464.399.777,62- Realisasi pendapatan daerah : 2.060.845.464.701,62- Capaian Kinerja : 10.16%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran	<ul style="list-style-type: none">- Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N : 1.333.714.773.868,19- Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	Badan Pengelola Keuangan dan



			Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Daerah tahun N : 2.032.136.514.517,19 - Capaian Kinerja : 65.63%	Aset Daerah
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	- Alokasi belanja infrastruktur pelayanan public : 125.133.618.120 - Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau desa : 1.806.723.992.700,66 - Capaian Kinerja : 6.93%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



3. Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.33

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : 1.734- Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : 2.462- Capaian Kinerja : 70.43%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



4. Fungsi Pengawasan

Tabel 2.34
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Fungsi Pengawasan Tahun 2025

N O	URUSAN	N O	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4	Fungsi Pengawasan		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5 : 3	Inspektorat
			Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5 : 3	Inspektorat
			Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5 : 3	Inspektorat



			Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2024	<ul style="list-style-type: none">- Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun 2024 :781- Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun 2025 :918- Capaian Kinerja : 85,08	
--	--	--	---	---	--



5. Urusan Pengadaan

Tabel 2.35
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengadaan Tahun 2025

N O	URUSAN	N O	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
5	Pengadaan		Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	<ul style="list-style-type: none">- Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa : 35.56- Capaian Kinerja : 35.56 Poin	Bagian Laayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pemanfaatan sistem pengadaan	<ul style="list-style-type: none">- Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan : 12.96- Capaian Kinerja : 12.96 Poin	Bagian Laayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	<ul style="list-style-type: none">- Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa : 8.57- Capaian Kinerja : 8.57 Poin	Bagian Laayanan Pengadaan Barang dan Jasa



6. Urusan Hubungan Dengan Perwakilan Daerah

Tabel 2.36

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Hubungan dengan Perwakilan Daerah Tahun 2025

N O	URUSAN	N O	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
6	Hubungan dengan Perwakilan Daerah		Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu : Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah
			Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2025	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun 2025 : 3- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 : 10- Capaian Kinerja : 23,08%	Bagian Hukum



7. Urusan Pelayanan Publik

Tabel 2.37

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pelayanan Publik Tahun 2025

N O	URUSAN	N O	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
7	Pelayanan Publik		Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan public : 86,68	Kominfotik



8. Urusan Pengembangan dan Penelitian

Tabel 2.38

Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengembangan dan Penelitian Tahun 2025

N O	URUSAN	N O	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
8	Pengembangan dan Penelitian		Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah : 6- Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah :13- Capaian Kinerja : 46,15%	Brida



2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Visi dan Misi Kabupaten Bima

Pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025–2029. Penetapan visi dan misi dimaksudkan agar kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bima, dilaksanakan lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang.

A. Visi

Visi pembangunan daerah di dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Berdasarkan uraian di atas, maka cita – cita pembangunan Kabupaten Bima selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

“Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”

Perumusan dan penjelasan lebih lanjut terhadap Visi dimaksud dijabarkan dalam pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bermartabat:** Makna “Bermartabat” memiliki arti bahwa Kabupaten Bima memiliki karakter dan kualitas sehingga dihargai, dihormati dan memiliki masyarakat Yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan.
2. **Berkemajuan:** Makna "Berkemajuan" memiliki arti bahwa Kabupaten Bima memiliki sumberdaya manusia yang berdaya saing, inovatif, adil, dan modern dengan berlandaskan pendidikan berkualitas tinggi. Kondisi Kabupaten Bima pada tahun 2029 diharapkan memiliki kualitas sumber daya manusia yang



berada pada posisi lebih tinggi secara nasional dan memiliki kompetensi dan daya saing pada skala global dengan didukung kapasitas penguasaan teknologi, sehingga menjadi *role model* pembangunan untuk daerah lain. Kondisi maju ini diwujudkan dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan dan budaya yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata;

3. **Makmur:** Makna "Makmur" adalah upaya untuk mewujudkan kondisi yang memperlihatkan masyarakat hidup dengan berkecukupan dan merata. Untuk mewujudkan kondisi makmur dan sejahtera, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sehingga perlu tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, masyarakat sejahtera juga mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat makmur dan sejahtera, tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu, yang setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan bersama.
4. **Tangguh:** Makna "Tangguh" adalah upaya Kabupaten Bima dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
5. **Berkelanjutan:** Makna "Berkelanjutan" merupakan upaya Kabupaten Bima dalam meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Hal ini meliputi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, tercipta lingkungan yang



ramah, ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Kabupaten Bima bertekad menjadi sebuah wilayah yang mengutamakan keunggulan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan kondisi berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Sehingga perlu pembangunan berkelanjutan diterapkan.

B. Misi

Visi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2025-2029 tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yakni:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil

Aparatur merupakan aktor utama dalam pembangunan maka aparatur pemerintah harus berkualitas dengan didukung oleh sistem tata kelola yang berkualitas sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah. Prinsip tata kelola yang telah diakui mampu memberikan pengaruh positif adalah prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* yaitu *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus oriented; equity; effectiveness dan efficiency; dan accountability* sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima.

Terdapat 3 Capaian Sasaran dalam Misi ini yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terbagi dalam 2 (dua) indikator yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target 2025 sebesar 80 % dari baseline 2024 sebesar 63,10 % dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target 2025 sebesar 78 % dari baseline 2024 sebesar 76,57 %
- b. Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN, terdapat 1 (satu) Indikator



yaitu Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) dengan target 2025 sebesar 76,50 % dari baseline 2024 sebesar 75,98%.

- c. Meningkatnya pelayanan publik yang prima, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan target 2025 sebesar 4 dari baseline 2024 sebesar 3,62.

Berdasarkan 3 sasaran tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 2025 70% dari 70% baseline 2024 sehingga diperoleh Realisasi sebesar 62,75%.

2. Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing

Membangun manusia yang sehat dan cerdas menjadi modal utama dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Bima. Sumber daya manusia yang unggul, memiliki karakter, dan daya saing tinggi menjadi representasi dari potensi manusia di Kabupaten Bima yang sehat, cerdas, dan dididik sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta luhur kebudayaan setempat. Sukses dalam mencapai misi ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan perkembangan manusia di Kabupaten Bima. Dalam konteks ini, fokus misi melibatkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan mengutamakan pembangunan manusia Kabupaten Bima menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam upaya mencapai visi pembangunan yang lebih maju. Pendidikan yang berkarakter, sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan lokal, menjadi fondasi yang kuat untuk mencetak generasi muda yang berdaya saing. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Bima dapat menikmati kesejahteraan fisik dan mental yang optimal. Dengan demikian, fokus pada Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup berbagai



aspek kehidupan manusia, mencerminkan komitmen Kabupaten Bima untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusianya, sehingga dapat Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Terdapat 5 Capaian Sasaran dalam Misi ini yaitu :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, terbagi dalam 2 (dua) indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) dengan target 2025 sebesar 72,25% dari baseline 2024 sebesar 71,88% dan Prevalensi Stunting dengan target 2025 sebesar 17,33% dari baseline 2024 sebesar 23,80%
- b. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata, terdapat 4 (empat) Indikator yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan target 2025 sebesar 8,56 tahun dari baseline 2024 sebesar 8,3 tahun; Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan target 2025 sebesar 14,12 tahun dari baseline 2024 sebesar 13,66 tahun; Literasi Membaca dengan target 2025 sebesar 53,96% dari baseline 2024 sebesar 52,32%; dan Numerasi dengan target 2025 sebesar 31,74% dari baseline 2024 sebesar 29,97%.
- c. Meningkatnya literasi masyarakat, terdapat 2 (dua) Indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan target 2025 sebesar 32,50 dari baseline 2024 sebesar 29,46 dan Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI) dengan target 2025 sebesar 43,11 dari baseline 2024 sebesar 42,54.
- d. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga, terdapat 3 (tiga) Indikator yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan target 2025 sebesar 0,439 dari baseline 2024 sebesar 0,479; Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan target 2025 sebesar 55 dari baseline 2024 sebesar 44,46; dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) dengan target 2025 sebesar 62,23 dari baseline 2024 sebesar 60,70.
- e. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan target 2025 sebesar 56,73



dari baseline 2024 sebesar 55,73.

Berdasarkan 5 sasaran tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Pembangunan dengan target 2025 71 dari 70,99 baseline 2024 sehingga diperoleh Realisasi sebesar 71,97.

3. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Sarana prasarana atau infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang perekonomian maupun pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Bima. Sarana dan prasarana berkualitas dan adaptif adalah infrastruktur yang dirancang dan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang muncul seiring waktu. Infrastruktur dalam kondisi mantap mengacu pada keadaan di mana fasilitas atau sarana publik yang termasuk dalam kategori infrastruktur berada dalam keadaan baik, terawat dengan baik, dan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Namun dalam pemanfaatan infrastruktur, infrastruktur yang berkualitas dan adaptif juga memperhitungkan dampak lingkungan dari pembangunan dan operasinya. Pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada serta fungsi ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan pemanfaatan ruang agar pembangunan infrastruktur dapat mendorong aspek keberlanjutan. Adapun urusan yang menjadi fokus dalam misi ini yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; serta pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diharapkan dapat Meningkatkan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Terdapat 1 Capaian Sasaran dalam Misi ini yaitu Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah, terbagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu Rasio Konektivitas dengan target 2025 sebesar 0,49 dari baseline 2024 sebesar NA;



Tingkat Kemantapan Jalan dengan target 2025 sebesar 54,71% dari baseline 2024 sebesar 53,11%; dan Rasio Permukiman Layak Huni dengan target 2025 sebesar 0,735 dari baseline 2024 sebesar 0,732.

Berdasarkan sasaran tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 2025 2,49 dari NA baseline 2024 sehingga diperoleh Realisasi sebesar 2,49.

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan

Kemandirian Ekonomi merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa tergantung dengan pihak lain. Kemandirian ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai misi ini dapat diukur melalui indikator-indikator seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Fokus utama, yaitu Misi 4, mencakup sektor-sektor kunci seperti tenaga kerja; pariwisata; penanaman modal; koperasi, usaha kecil, dan menengah (UKM), perdagangan; perindustrian; pangan; pertanian; serta kelautan dan perikanan. Potensi ekonomi dan sumber daya lokal menjadi pusat perhatian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Misi 4 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan, memajukan sektor pariwisata untuk mengoptimalkan daya tarik wisata lokal, serta memberikan dorongan kepada penanaman modal dan perkembangan usaha kecil dan menengah. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan peningkatan produksi daerah dan mendukung pertumbuhan UKM. Perdagangan, perindustrian, pertanian, serta sektor kelautan dan perikanan menjadi elemen-elemen penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bima. Fokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah pada produk lokal merupakan strategi



untuk memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Dengan demikian, melalui penekanan pada potensi ekonomi dan sumber daya lokal, misi ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat sehingga Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif.

Terdapat 13 Capaian Sasaran dalam Misi ini yaitu :

- a. Meningkatkan peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, terbagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB dengan target 2025 sebesar 40,00% dari baseline 2024 sebesar 45,16%; Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target 2025 sebesar 117 dari baseline 2024 sebesar 117; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan target 2025 sebesar 120 dari baseline 2024 sebesar 119.
- b. Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dengan target 2025 sebesar 3,06% dari baseline 2024 sebesar 2,76%.
- c. Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target 2025 sebesar 7,54% dari baseline 2024 sebesar 0,09%.
- d. Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah, terdapat 2 (tiga) Indikator yaitu Kontribusi UMKM terhadap PDRB dengan target 2025 sebesar 0,57 dari baseline 2024 sebesar 0,14 dan Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dengan target 2025 sebesar 0,57 dari baseline 2024 sebesar 0,14.
- e. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terdapat 2 (dua) Indikator yaitu Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB dengan target 2025 sebesar 0,45% dari baseline



- 2024 sebesar 0,38% dan Nilai tambah Ekonomi Kreatif dengan target 2025 sebesar Rp. 511,90 Milyar dari baseline 2024 sebesar Rp. 420,982 Milyar.
- f. Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dengan target 2025 sebesar 3,90 dari baseline 2024 sebesar 3,85.
 - g. Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Tingkat Inflasi dengan target 2025 sebesar 2,80% dari baseline 2024 sebesar 2,30%.
 - h. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 2025 sebesar 9,1% dari baseline 2024 sebesar 8,13%.
 - i. Meningkatnya nilai investasi daerah, terdapat 2 (dua) Indikator yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan target 2025 sebesar 38,02% dari baseline 2024 sebesar 37,95% dan Persentase peningkatan nilai investasi dengan target 2025 sebesar 55,50% dari baseline 2024 sebesar 49,87%.
 - j. Meningkatnya kesempatan kerja, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 2025 sebesar 2,04% dari baseline 2024 sebesar 2,15%.
 - k. Terwujudnya ketahanan pangan, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan target 2025 sebesar 79 dari baseline 2024 sebesar 78,26.
 - l. Meningkatnya kemandirian desa, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Desa dengan target 2025 sebesar 66,56 dari baseline 2024 sebesar 63,56.
 - m. Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Indeks Pembangunan Pemuda dengan target 2025 sebesar 54 dari baseline 2024 sebesar 53,67.

Berdasarkan 13 sasaran tersebut di atas, maka diperoleh Pertumbuhan Ekonomi



dengan target 2025 5,63% dari 2,82% baseline 2024 sehingga diperoleh Realisasi sebesar 3,22%.

5. Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya

Untuk membangun kapasitas pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak adalah sebuah langkah penting dalam membangun dasar pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Melalui misi ini, Kabupaten Bima berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang setiap individu diperlakukan dengan menghargai dan melindungi hak-hak asasinya, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap kemajuan dan keberlanjutan daerah. Fokus utama misi ini meliputi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kebudayaan, dan lingkungan hidup dengan upaya akan difokuskan pada aspek-aspek keagamaan, kebudayaan dan elemen-elemen pemerintahan umum, serta lingkungan hidup. Dalam konteks misi ini, Kabupaten Bima mengusung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi utama untuk membangun masyarakat yang berakhlak. Langkah-langkah akan diarahkan pada memastikan bahwa setiap warga mendapat perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasarnya. Melalui penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Kabupaten Bima berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi semua warganya. Fokus misi ini juga memperhatikan aspek sosial dan pemerintahan umum sebagai bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aman, harmonis dan berakhlak. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan, Kabupaten Bima berharap dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif serta memberikan manfaat bagi seluruh



lapisan masyarakat. Selain itu, dampak lingkungan seperti kebencanaan menjadi perlu perhatian khusus dengan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana. Diperlukan pula kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, masyarakat, organisasi lain, dan swasta dalam aspek adaptasi dan ketahanan bencana

Keselarsan misi antara tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Bima memiliki peran yang krusial dalam mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Pada tingkat nasional, misi pembangunan seringkali mencakup arah strategis dan visi bersama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya keselarsan ini, pemerintah pusat dapat memberikan panduan dan dukungan yang konsisten dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di provinsi dan kabupaten.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tingkat *intermediate* antara nasional dan Kabupaten Bima memiliki peran penting dalam mengimplementasikan misi pembangunan nasional dan menyesuakannya dengan kebutuhan lokal. Keselarsan antara misi provinsi dengan nasional menciptakan sinergi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang merata di seluruh NTB. Dengan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional ke dalam konteks regional, Provinsi NTB dapat memastikan bahwa setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Bima, memiliki arah yang sejalan dengan misi nasional dan mendukung visi keseluruhan pembangunan regional.

Pentingnya keselarsan misi juga sangat terasa di tingkat Kabupaten Bima. Dengan memahami dan merangkum misi nasional dan Provinsi NTB, pemerintah kabupaten dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan visi nasional dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Keselarsan ini membuka peluang untuk pemanfaatan



sumber daya secara optimal, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bima. Sehingga tercapai tujuan Terwujudnya masyarakat yang Harmonis dan Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Terdapat 2 Capaian Sasaran dalam Misi ini yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan, terbagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air dengan target 2025 sebesar 75,34 dari baseline 2024 sebesar 47,78; Indeks Kualitas Udara dengan target 2025 sebesar 95,10 dari baseline 2024 sebesar 93,69; dan Indeks Kualitas Lahan dengan target 2025 sebesar 72,78 dari baseline 2024 sebesar 63,11.
- b. Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, terbagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan target 2025 sebesar 132,86 dari baseline 2024 sebesar 135,17; Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan target 2025 sebesar 2,15% dari baseline 2024 sebesar NA; dan Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan dengan target 2025 sebesar 19,83% dari baseline 2024 sebesar NA.

Berdasarkan 2 sasaran tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 2025 78,68 dari 69,73 baseline 2024 sehingga diperoleh Realisasi sebesar 66,69.

C. Program Prioritas

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Bima, RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, evaluasi pelaksanaan RKPd tahun 2025, RKP Tahun 2025, RKPd Provinsi NTB, permasalahan di Kabupaten Bima, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, Kabupaten Bima menyusun tema pembangunan untuk RKPd Tahun 2025 sebagai berikut mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui hilirisasi



komoditas unggulan

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Bima telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan dan Berdaya Saing;
3. Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Pendukung Kawasan strategis;
4. Kemandirian ekonomi berbasis Kawasan strategis dan komoditas unggulan;
5. Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai social budaya berbasis lingkungan;



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur,



Bupati atau Walikota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah otonomi, atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pembantuan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Secara asas penyelenggaraan urusan pemerintahan prinsip penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yaitu :

1. untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) di daerah, kementerian/lembaga tidak membentuk instansi vertikal, meminta bantuan kepada daerah otonomi.
2. daerah otonomi bertindak sebagai pelaksana penugasan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.
3. anggaran yang diperlukan oleh daerah otonom untuk melaksanakan tugas pembantuan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kecuali belanja yang sudah melekat pada daerah seperti belanja pegawai, operasional kantor (listrik, air dan lain-lain) menjadi tanggung jawab daerah otonom.
4. hubungan daerah otonom dengan pemberi tugas tidak bersifat hirarkhi atasan-bawahan, melainkan koordinatif-fungsional. Oleh karena itu tidak dikenal delegasi dari



kementerian/lembaga kepada daerah, karena delagasi adalah dari pejabat atasan kepada bawahan. Sedangkan pejabat daerah bukan bawahan pejabat pusat.

4.1 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan di Kabupaten Bima

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bima Mendapatkan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.2 Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bima adalah Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Transmigrasi sesuai Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025. Penyelenggaraan Program Transmigrasi merupakan satu Program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka isolasi wilayah atau kawasan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025, melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 471.034.000. dengan realisasi keuangan Tahun 2025 sebesar Rp. 467.769.000. atau 99,31% Adapun sasarannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan dikawasan Transmigrasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama Air Bersih baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk air pertanian, Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Sanitasi di Lingkungan Sekolah pada Kawasan transmigrasi di Kecamatan Tambora Kabupaten Bima.

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima berasal dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sebesar



Rp. 4.310,160.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk Pekerjaan Jaringan Air Bersih Perpipaan, Rehab Sekolah, Pembangunan Toilet dan SAB Sekolah serta layanan Administrasi kegiatan. Dari Anggaran tersebut yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 4.296.947.234,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar **99,69%**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	694622 DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA	PAGU	0	4,310,160,000	0	0	0	0	0	0	0	4,310,160,000
		REALISASI	0.00%	4,296,947,234 (99.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,296,947,234 (99.69%)
		SISA	0	13,212,766	0	0	0	0	0	0	0	13,212,766
GRAND TOTAL		PAGU	0	4,310,160,000	0	0	0	0	0	0	0	4,310,160,000
		REALISASI	(0.00%)	4,296,947,234 (99.69%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,296,947,234 (99.69%)
		SISA	0	13,212,766	0	0	0	0	0	0	0	13,212,766



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000031. Penginapan	2,800,000	0	0	0	0	0.00 %	2,800,000
000032. Transport	2,200,000	0	0	1,100,000	1,100,000	50.00 %	1,100,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,360,000	0	0	1,360,000	1,360,000	100.00	0
000033. Transport	1,360,000	0	0	1,360,000	1,360,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	39,740,000	0	25,200,000	14,540,000	39,740,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	39,740,000	0	25,200,000	14,540,000	39,740,000	100.00	0
002.0A Operasional pengelola satker	39,740,000	0	25,200,000	14,540,000	39,740,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28,740,000	0	17,800,000	10,940,000	28,740,000	100.00	0
000012. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	8,220,000	0	5,480,000	2,740,000	8,220,000	100.00	0
000013. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	7,980,000	0	5,320,000	2,660,000	7,980,000	100.00	0
000014. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	3,180,000	0	2,120,000	1,060,000	3,180,000	100.00	0
000015. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	2,820,000	0	1,880,000	940,000	2,820,000	100.00	0
000016. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	2,100,000	0	1,400,000	700,000	2,100,000	100.00	0
000017. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2,040,000	0	0	2,040,000	2,040,000	100.00	0
000018. Honorarium Anggota/Petugas (UAPPA/Barang-EI)	2,400,000	0	1,600,000	800,000	2,400,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	11,000,000	0	7,400,000	3,600,000	11,000,000	100.00	0
000019. Fotocopy, Penggandaan, dan Penjilitan	5,000,000	0	3,300,000	1,700,000	5,000,000	100.00	0
000020. ATK dan Komputer Suplies	6,000,000	0	4,100,000	1,900,000	6,000,000	100.00	0



4.3 Kesimpulan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bima pada Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penyelenggara tugas pembantuan. Penyelenggaraan dana Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025 sebesar **Rp. 4.310,160.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dari Anggaran tersebut yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 4.296.947.234,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,69% dengan realisasi fisik sebesar 100%. yang yang terpusat pada kawasan Transmigrasi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima.

Dari pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima di Kawasan Transmigrasi Tambora, diprioritaskan untuk Pekerjaan Jaringan Air Bersih Perpipaan, Rehab Sekolah, Pembangunan Toilet dan SAB Sekolah serta layanan Administrasi kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sarana Air Bersih Perpipaan yang di UPT. Sori Panihi SP. 2, SP. 4 dan SP. 5 asas manfaatnya sudah seperti yang diharapkan yaitu bisa dimanfaatkan oleh warga karena jaringan perpipaannya sudah sampai ke pemukiman dan Lahan Usaha Warga.
2. Kegiatan Belajar Mengajar dapat dilaksanakan dengan baik karena sekolah sudah dalam kondisi baik.
3. Dengan adanya Pembangunan Toilet dan SAB Sekolah Sanitasi di sekolah sudah memenuhi standar



BAB IV PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1 Urusan Pendidikan

1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- b. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

1.2 Target Pencapaian

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan Pendidikan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun 100% yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%



1.3. Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Tahun 2025			
		Target (%)	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi (%)
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	15.038	13.910	92.50%
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	60.150	52.360	87.05%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun 100% yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	1.126	890	79.40%



1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik			0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	3,327,600,000	3,104,264,350	93.29%
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	29,200,000	24,900,000	85.27 %
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit			
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			
			Kekhususan PAUD				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0		
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	84,472,000	75,538,000	89.42 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	267,265,000	262,193,000	98.10 %
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang			



	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	dokumen			
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	komunitas			
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Orang				
Angka Partisipasi Sekolah						
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	11,395,060,000	10,910,875,00	95.75%
		Literasi				
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,144,000,000	1,138,225,077	99.50 %
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	3,276,950,000	3,180,250,000	97.05 %
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	291,637,500	290,699,000	99.68 %
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	11,278,000	10,753,000	95.34 %
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	20,840,000	19,740,000	94.72 %
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00%
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KOMunitas	10,337,500	6,450,000	62.39 %



			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	277,452,500	265,710,571	95.77 %
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang			
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	16,757,500	13,654,000	81.48 %
			Numerasi				
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,276,950,000	3,180,250,000	97.05 %
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	291,637,500	290,699,000	99.68 %
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	11,278,000	10,753,000	95.34 %
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0		
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	KOMunitas	10,337,500	6,450,000	62.39 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan	16,767,000	13,654,000	81.43 %
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	buku	277,452,500	265,710,571	95.77 %
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang			
			Keamanan				
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	0	0	0
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang			



			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan	63,500,000	63,500,000	93.63 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			
			Kebhinekaan				
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	0	0	0.00 %
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00%
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan	63,500,000	59,452,000	93.63 %
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			
			Inklusifitas				
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	KOnten digital	0	0	0.00%
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00%
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan	0	0	0
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi Sekolah				
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	unit	0	0	0.00%
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ruang	3,002,379,074	2,587,300,000	86.17 %
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	0	0	0



		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	25,245,000	22,695,000	89.90 %
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	3,507,500,000	115,000,000	3.28%
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	0	0	0%
		Literasi				
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	497,500,000	495,677,026	99.63 %
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,110,000,000	937,599,000	84.47 %
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	245,102,000	212,375,180	86.65 %
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	12,163,500	8,813,500	72.46 %
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	10,072,000	8,322,000	82.63 %
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	0	0	0
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	komunitas	15,625,000	10,200,000	65.28 %
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan	22,343,500	22,343,500	100%
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	buku	55,120,000	46,849,600	85%
		Numerasi		0	0	0
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	orang	1,110,000,000	937,599,000	84.47 %
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	orang	245,102,000	212,375,180	86.65 %



		Dasar/Sekolah Menengah Pertama				
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	12,163,500	8,813,500	72.46 %
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	15,625,000	10,200,000	65.28 %
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan pendidikan	22,343,500	22,343,500	100.00 %
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	buku	55,120,000	46,849,200	84.99 %
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	497,500,000	495,677,000	99.63 %
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital	10,072,000	8,322,000	82.63 %
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang			
		Keamanan				
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital			
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan			
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	keluarga			
		Kebhinekaan				
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten digital			
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan	33,900,000	33,750,000	99.56 %



		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan			
		Inklusifitas				
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kontel digital			
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan pendidikan	33,900,000	33,750,000	99.56 %
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan			
	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah				
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	18,500,000	18,250,000	98.65 %
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	laporan	28,500,000	27,100,000	95.09 %
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah	Literasi				
		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat	buku			



			Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota				
			Numerasi				
			Penyediaan Dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	buku			



1.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Personil Urusan Pendidikan

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama IV/c	1
Sekretaris	Pembina Utama Muda IV/b	1
Kepala Bidang	Pembina IV/a	4
Kepala Seksi/Sub bagian	Penata Tk.I III/d	5
Jafung	Pembina IV/a	7
Staf	Penata Muda Tk.I III/b	59
TOTAL		77

1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Data anak tidak sekolah (ATS) tidak terintegrasi dengan DAPODIK sehingga data ATS tidak bisa didapatkan secara tepat.	Telah dialokasikan kegiatan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang disesuaikan dengan data Dapodik
2. Pengumpulan data masih terkendala oleh ketersediaan data satuan Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Bima.	Telah dilakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Agama Kab. Bima
3. Data penunjang SPM untuk kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan belum tersedia.	Telah dilakukan Verikasi dan falidasi data Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan
4. Rendahnya Tingkat keakuratan data pokok Pendidikan menyulitkan proses perhitungan kebutuhan	Telah dilakukan Bimtek Operator Dapodik bagi semua satuan Pendidikan.
5. Kurangnya ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Telah dilakukan perekrutan Pegawai melalui P3K
6. Pelaksanaan SPM PAUD terkendala oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan Masyarakat sehingga dengan segala keterbatasan yang ada cakupan dan standar pelayanan Anak Usia Dini tidak dapat dipenuhi sesuai kebutuhannya	Telah dilakukan sosialisasi pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini terkait semua cakupan standar Pelayanan Usia Dini



2. Urusan Kesehatan

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
- e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

2.2. Target Pencapaian

Target dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Target SPM Urusan Kesehatan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	100%
pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%



pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
pelayanan kesehatan pada usia produktif	persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 100% berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien IMS, Waria/Transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100%



2.3.1 Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Realisasi SPM Urusan Kesehatan

JENIS PELAYANAN DASAR	Jumlah Warga Negara yang harus dilayani	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan	TARGET (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.722	9.722	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.280	9.280	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.838	8.838	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita	5.407	5.407	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	78.721	67.965	100%	86.34 %
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	317.431	263.575	100%	83.03 %
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	59.413	58.787	100%	98.95 %
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.087	40.087	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.995	7.995	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1.434	1.434	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.190	9.190	100%	100 %
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	11.216	10.888	100%	97.08 %



2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	300,000,000	299,549,855	99.85%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	515,900,000	473,646,090	91.81%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	237,299,500	233,334,870	98.33 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	194,497,000	191,342,700	98.38%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	300,317,000	292,828,400	97.51 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	223,731,000	293,587,700	87.99 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	300,346,000	80,000,000	97.75 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	276,238,000	271,077,500	98.13 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	246,921,000	217,953,000	88.27 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	292,910,000	291,757,375	99.61 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	300,000,000	270,050,800	90.02 %
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	300,000,000	290,116,377	96.71



2.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Personil SPM Urusan Kesehatan

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Madya/ IV/c	1
Sekretaris	Pembina Utama Muda/ IV/b	1
Kepala Bidang	Pembina Tk 1, IV/a	3
	Penata Tk 1, III/d	1
Kepala Sub Bagian	Penata Tk 1, III/d	2
	Penata, III/c	1
Jafung	Pembina Tk 1, IV/a	1
	Penata Tk 1, III/d	5
	Penata, III/c	3
	Penata MUda Tk 1, III/b	1
Staf	Penata Tk 1, III/d	1
Kepala UPT BLUD Puskesmas	Pembina Utama Muda/ IV/b	1
	Pembina Tk 1, IV/a	4
	Penata Tk 1, III/d	12
	Penata, III/c	4
TOTAL		41

JABATAN	PNS		NON PNS		TOTAL
	L	P	L	P	
Dokter Spesialis	10	10	2	1	23
Dokter Gigi Spesialis	0	1	0	0	1
Dokter Sub Spesialis Dasar	0	0	0	0	0
Dokter	22	36	13	30	101
Dokter Gigi	1	7	1	8	17
Keperawatan	109	292	349	678	1428
Kebidanan	0	312	0	1012	1324
Apoteker	5	24	12	40	81
Tenaga Teknik Kefarmasian	4	15	18	59	96



Kesehatan Masyarakat	17	38	46	107	208
Kesehatan Lingkungan	19	37	18	27	101
Gizi	8	53	2	60	123
Keterampilan Fisik	0	7	0	5	12
Keteknisian Medis	6	35	22	72	135
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	8	32	28	101	169
Teknik Biomedika Lainnya	10	12	10	6	38
Kesehatan Tradisional	0	0	0	0	0
Makes lainnya	0	0	3	9	12
Asisten Keperawatan	0	2	1	2	5
Asisten Kebidanan	0	3	0	6	9
Asisten Kefarmasian	2	6	0	6	14
Asisten Teknik Biomedika	0	2	0	3	5
Asisten Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0
Asisten Gizi	0	3	0	2	5
Asisten Keteknisian Medis	0	2	1	4	7

2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan

NO	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
1.	PENGUMPULAN DATA	
	<ul style="list-style-type: none"> Penemuan kasus rendah (banyak sasaran yang tidak mau memberikan dahaknya) 	advokasi ke lintas sektor, kepala desa, toma, toga, dan keluarga dekat pasien terkait pentingnya pemberian dahak bagi pasien suspect TB
	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada fasyankes yang belum mengupdate laporan penjarangan pasien suspect TB di SITB 	Melakukan evaluasi secara berkala dan tetap memonitoring penginputan laporan Puskesmas di aplikasi SITB
	<ul style="list-style-type: none"> Petugas belum ada yg di latih cara menginput Aplikasi simkeswa dan sasaran banyak yg tidak Mempunyai NIK keluarga tidak mau mengurus dan memasukan di Kartu Keluarga 	Melakukan orientasi/ pelatihan penginputan data pada aplikasi Simwakeswa bagi penanggung jawab program jiwa di Puskesmas. Serta melakukan advokasi ke pihak desa agar dapat membantu sasaran pasien ODGJ yang tidak mempunyai NIK untuk dapat diuruskan ke Dinas Disdukcapil
	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini PTM mempengaruhi peningkatan capaian deteksi dini 	Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya melakukan deteksi dini guna mencegah Penyakit Tidak Menular.
	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada petugas yang terlatih Aplikasi ASIK 	Melakukan orientasi/ pelatihan penginputan data pada aplikasi ASIK bagi penanggung jawab program Imunisasi di Puskesmas.
	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa Puskesmas masih terkendala dalam pelaporan menggunakan aplikasi SIHA (untuk kasus HIV) 	Melakukan orientasi/ pelatihan penginputan data pada aplikasi SIHA bagi penanggung jawab program HIV di Puskesmas.



	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua sekolah dapat dijaring utk dilakukan penjangkaran terkendala tidak ada anggaran 	Melakukan advokasi kekepala OPD terkait prioritas penganggaran untuk pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan pada anakusia pendidikan dasar sesuai standar disemua Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlalu tingginya data proyeksi sehingga utk hasil penjangkarnya tidak bisa mencapai standar 	Melakukan konsolidasi data sasaran dengan OPD pengampu lain yang memiliki data sasaran anak usia pendidikan dasar seperti Dinas pendidikan dan olahraga agar data proyeksi yang terlalu tinggi tidak perlu digunakan lagi
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua Puskesmas melakukan pendataan sasaran riil ibu hamil ataupun pendataan Kohort Dinamis 	Melakukan evaluasi dan validasi data secara rutin terhadap data Puskesmas yang masuk ke kabupaten, dan menyarankan agar Puskesmas melakukan pelaporan dengan dua jenis data yaitu data proyeksi dan data riil
	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran yang dipakai untuk Program adalah sasaran proyeksi bukan sasaran riil 	Melakukan penyamaan persepsi melalui rapat koordinasi dengan petugas di Puskesmas guna menyepakati penggunaan data yang akandigunakan dalam pelaporan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penginputan Pelayanan Kesehatan bumil di e-kohort belum optimal di semua Puskesmas dan RS 	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penginputan pelayanan kesehatan ibu hami di e-kohort secara berkala di tingkat Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian dan pemanfaatan buku KIA belum optimal 	Melakukan monitoring dan evaluasi pgunaan dan pemanfaatan secara berkala di tingkat Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi bidan dalam Pelayanan ANC Standar dan terintegrasi belum semuanya terampil dan kompeten pada Nakes 	Melakukan peningkatan kapasitas baik berupa orientasi/pelatihan bagi tenaga bidan di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan USG pada K1 dan K5 belum berjalan optimal di beberapa Puskesmas terkait tenaga Dokter Terlatih USG dasar di Puskesmas dan belum ada Perbup atau Perda yang mengatur Pelayanan USG 	Melakukan konsultasi ke bagian hukum Setda terkait pembuatan Peraturan Bupati terkait pelayanan USG di Puskesmas, dan membuat daftar Puskesmas yang belum terpenuhi data dokter terlatih USG nya untuk diusulkan mengikuti pelatihan terkait USG dasar ke propinsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pertolongan Persalinan di Faskes belum Optimal di beberapa Puskesmas (masih bersalin di Polindes/ Poskesdes) 	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait upaya Puskesmas dalam menangani permasalahan terhadap masyarakat yang masih bersalin di Polindes/Poskesdes secara berkala di tingkat Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di beberapa Puskesmas tidak memenuhi standar untuk persalinan 	Melakukan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di Puskesmas agar pelayanan persalinan dapat sesuai standar
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Buku KIA belum Optimal 	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengisian buku KIA secara berkala di tingkat Puskesmas/Posyandu
	<ul style="list-style-type: none"> • Form MTBM belum tersedia sejumlah 3 x sasaran Bayi Baru Lahir 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan form MTBM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • sasaran bayi baru lahir di layani SHK belum semua BBL terlayani 	Melakukan sosialisasi dan advokasi ke masyarakat melalui Puskesmas tentang pelayanan SHK yang harus diperoleh oleh bayi baru lahir
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Neonatal Esensial belum Optimal dilaksanakan 	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ppelayanan neonatal esensial yang belum optimal secara berkala di tingkat Puskesmas/Posyandu
	<ul style="list-style-type: none"> • Kuesioner Pra Skrining Perkembangan KPSP) dan Formulir DDTK belum tersedia sesuai kebutuhan 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan KPSP) dan Formulir DDTK di Puskesmas



	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Dokter, bidan, perawat maupun Nutrisionis belum semuanya mendapatkan pelatihan SDIDTK 	Melakukan peningkatan kapasitas baik berupa orientasi/pelatihan bagi tenaga dokter, bidan, perawat maupun nutrisionis tentang SDIDTK di Puskesmas
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	<ul style="list-style-type: none"> dibutuhkan ketersediaan Catridge TCM 	Menyediakan anggaran untuk Catridge TCM bagi pasien TB
	<ul style="list-style-type: none"> dibutuhkan kendaraan dinas untuk memudahkan untuk menjangkau sasaran 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bagi petugas TB di lapangan agar dapat menjangkau sasaran
	<ul style="list-style-type: none"> penambahan 1 petugas penginput data 	Menginstruksikan kepala Puskesmas agar dapat menambah petugas dalam penginputan data pasien TB di aplikasi SITB
	<ul style="list-style-type: none"> dibutuhkan Alat Fiksasi Untuk Evakuasi Pasien ODGJ Berat 	menyediakan anggaran untuk pengadaan Alat Fiksasi Untuk Evakuasi Pasien ODGJ Berat bagi petugas program jiwa di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> pelatihan 1 petugas input data Simkesewa 	Melaksanakan orientasi/pelatihan bagi petugas penginput data di aplikasi Simkeswa di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> belum terbentuknya TPKJM (Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat) 	Melakukan advokasi ke atasan langsung dan lintas sektor tentang pembentukan tim TPKJM
	<ul style="list-style-type: none"> ketersediaan tenaga terlatih 	Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan terutama program yang terkait SPM bidang kesehatan di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> ketersediaan paket data bagi petugas 	Menyediakan anggaran untuk pengisian paket data bagi petugas yang melakukan penginputan data sasaran terkait program SPM bidang kesehatan di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa Puskesmas stok reagen duo untuk ibu hamil masih kosong 	Menyediakan anggaran bagi Puskesmas yang belum tercukupi stok reagen duo untuk ibu hamil
	<ul style="list-style-type: none"> ketersediaan buku raport kesehatanku belum terpenuhi untuk semua anak sekolah 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan buku raport kesehatanku bagi anak usia pendidikan dasar
	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Stick untuk pemeriksaan Kolesterol dan asam urat sangat terbatas 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan stik dan pemeriksaan kolesterol di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Format CATPOR yang di sediakan dari dinas kesehatan sangat minim : Kohort Lansia, Format P3G, Buku Kesehatan Lansia 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan Format CATPOR yang di sediakan dari dinas kesehatan sangat minim : Kohort Lansia, Format P3G, Buku Kesehatan Lansia
	<ul style="list-style-type: none"> Petugas kesehatan lansia di puskesmas yang ada hanya 1-2 orang sedangkan lansia yang dilayani sangat banyak 	Menginstruksikan kepada Puskesmas agar menambah jumlah petugas kesehatan lansia ketika turun ke lapangan
	<ul style="list-style-type: none"> Sering pergantian petugas pengelola program kesehatan lansia dan SDM yang ada di Puskesmas sebagian masih status sukarela 	Menginstruksikan kepada kepala Puskesmas agar tidak mengganti petugas penanggung jawab program kesehatan lansia sebelum dilakukan transfer informasi dari petugas lama ke petugas baru
	<ul style="list-style-type: none"> Petugas Kesehatan Lansia yang terlatih masih sebagian kecil 	Melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap program lansia di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Buku KIA untuk ibu hamil terpenuhi sampai bulan Desember 2025 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan Buku KIA bagi ibu hamil
	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Kartu ibu belum terpenuhi untuk semua sasaran Ibu Hamil 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan Kartu ibu bagi ibu hamil



	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kelas ibu hamil belum mencakup semua sasaran ibu hamil dan ibu hamil lulus kelas ibu masih jauh dibawah target 	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan permasalahan terkait capaian SPM di tingkat Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Bidan terlatih dan terampil dalam ANC Standar 	Melakukan peningkatan kapasitas bagi bidan tentang ANC standar
	<ul style="list-style-type: none"> Buku KIA belum terisi sesuai Pelayanan 	Melakukan monitoring, evaluasi dan orientasi bagi bidang di Puskesmas tentang cara pengisian buku KIA yang baik dan benar
	<ul style="list-style-type: none"> Buku KIA belum tersedia untuk semua sasaran Balita 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan Buku KIA bagi sasaran Balita
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada insentif bagi penginput data di aplikasi program SPm bidang kesehatan 	Menyediakan anggaran untuk honor bagi penginput data SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> pengadaan anggaran transportasi kader bagi pemantauan minum obat (PMO) 	Menyediakan anggaran untuk honor bagi kader bagi pemantauan minum obat (PMO)
	<ul style="list-style-type: none"> pelaksanaan penjangkaran kasus TBC belum maksimal 	Melakukan advokasi di tingkat desa dan kecamatan tentang penanganan TBC di desanya
	<ul style="list-style-type: none"> pelaksanaan skrining di Posyandu dan OPD di kecamatan 	Melakukan optimalisasi pelaksanaan skrining kesehatan baik bagi lansia maupun bagi usia produktif di Posyandu
	<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran untuk kegiatan HIV di beberapa Puskesmas masih kurang 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> anggaran utk data sasaran sebanyak itu belum bisa maksimal di puskesmas 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Anggaran untuk program lansia di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan sangat minim. 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk sweeping lansia yang tidak datang ke posyandu 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan di masing-masing puskesmas belum ada, sedangkan format pelaporan di provinsi wajib di anjurkan untuk kegiatan tersebut 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Biaya transport petugas untuk pelayanan ibu hamil 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Pemenuhan kebutuhan Catpor Ibu Hamil : Register Kohort, Kartu ibu 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Kelas ibu sesuai sasaran ibu hamil 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Pelatihan/ Orientasi/ OJT ANC standar dan terintegrasi bagi Bidan 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Pelatihan/ OJT USG bagi Dokter umum di semua Puskesmas, minimal 2 dokter terlatih untuk masing-masing Puskesmas 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Biaya transport petugas untuk pelayanan ibu hamil 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Pemenuhan kebutuhan Catpor Ibu Hamil : Register Kohort, Kartu ibu 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk Kelas ibu sesuai sasaran ibu hamil 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas



	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk Pelatihan/ Orientasi/ OJT ANC standar dan terintegrasi bagi Bidan 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk Pelatihan/ OJT USG bagi Dokter umum di semua Puskesmas, minimal 2 dokter terlatih untuk masing-masing Puskesmas 	Menyediakan anggaran untuk Pelatihan/ OJT USG bagi Dokter umum di semua Puskesmas, minimal 2 dokter terlatih dimasing-masing Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk Bangunan baru atau rehab fisik bangunan ruangan Persalinan. 	Melakukan penambahan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait SPM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk ketersediaan Formulir MTBM 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan formulir MTBM di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk BMHP SHK 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan BMHP SHK di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk Kebutuhan Pelayanan Neonatal Esensial 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan kebutuhan KPSP di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk ketersediaan Formulir KPSP dan DDTK 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan formulis KTSP dan DDTK di Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk Pelatihan/ Orientasi / OJT SDIDTK bagi Nakes 	Menyediakan anggaran untuk Pelatihan/ OJT SDIDTK bagi nakes Puskesmas
	<ul style="list-style-type: none"> • anggaran untuk pengadaan buku KIA versi terbaru 	Menyediakan anggaran untuk pengadaan Buku KIA versi baru di Puskesmas
4 .	PELAKSANAAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • penemuan kasus masih rendah 	Melakukan sweeping ke rumah-rumah dan melakukan advokasi ke desa guna meningkatkan sasaran penemuan kasus TB
	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan kasus mangkir pengobatan belum maksimal 	Melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan pelayanan bagi pasien kasus mangkir pengobatan TB
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan TPKJM agar Pasien ODGJ tidak ada yg di telantarkan 	Melakukan advokasi ke atasan langsung dan lintas sektor tentang pembentukan tim TPKJM
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia produktif sebagian besar telah berjalan dengan baik, namun perlu perbaikan di beberapa aspek pendukung 	Melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan pelayanan bagi sasaran usia produktif di lapangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Skrining pada kelompok kunci (Poci) masih terkendala disebabkan Poci susah untuk diajak kerjasama untuk skrining 	Melakukan avokasi kepada pihak keluarga dan atau pemerintah setempat, RT, RW, kepala desa maupun tokoh masyarakat agar sasaran kelompok kunci (Poci) ini dapat melakukan skrining
	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan posyandu remaja di puskesmas telah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana prasarana, kesulitan transportasi, kurangnya tenaga dan kader kesehatan serta dana yang tidak memadai 	Melakukan optimalisasi pelaksanaan Posyandu keluarga dimasyarakat dengan melibatkan lintas sektor seperti, camat, kepala desa, kepala dukun, RT, RW , toma dan Toga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Posyandu Lansia di puskesmas telah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana prasarana, kesulitan transportasi, kurangnya tenaga dan kader kesehatan serta dana yang tidak memadai 	Melakukan optimalisasi pelaksanaan Posyandu keluarga termasuk posyandu KIA, remaja dan Lansia dimasyarakat dengan melibatkan lintas sektor seperti, camat, kepala desa, kepala dukun, RT, RW, toma dan Toga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sebagian besar telah berjalan dengan baik, namun perlu perbaikan di beberapa aspek pendukung 	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil serta tetap melakukan advokasi dengan lintas sektor seperti ketua RT, RW, kades, toma, toga guna peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil



	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sebagian besar telah berjalan dengan baik, namun perlu perbaikan di beberapa aspek pendukung 	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta tetap melakukan advokasi dengan lintas sektor seperti ketua RT, RW, kades, toma, toga guna peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagian besar telah berjalan dengan baik, namun perlu perbaikan di beberapa aspek pendukung 	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir serta tetap melakukan advokasi dengan lintas sektor seperti ketua RT, RW, kades, toma, toga guna peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelayanan kesehatan balita sebagian besar telah berjalan dengan baik, namun perlu perbaikan di beberapa aspek pendukung 	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan balita serta tetap melakukan advokasi dengan lintas sektor seperti ketua RT, RW, kades, toma, toga guna peningkatan pelayanan kesehatan balita
	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran ibu hamil masih ada yang tidak berkunjung untuk pemeriksaan darah 	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta tetap melakukan advokasi dengan lintas sektor seperti ketua RT, RW, kades, toma, toga guna peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin
	<ul style="list-style-type: none"> • capaian peralatan anafilaktik pada mutu pada indikator pelayanan kesehatan pada Balita bernilai nol karena tidak ditemukannya kasus KIPI (kejadian Ikutan pasca imunisasi) berat pada balita selama tahun 2025 	Penghapusan menu mutu untuk peralatan anafilaktik pada aplikasi e-SPM Kebangda

3. Urusan Pekerjaan Umum

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM pada Urusan Pekerjaan Umum di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.

3.2 Target Pencapaian

Target dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%



3.3. Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bima sebagai berikut :



Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Realisasi
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Pemenuhan Kebutuha Pokok Air Minum Sehari hari Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%	5.016	5.016	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%	150	150	100%

3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan	SUB KEGIATAN	SATUAN	Anggaran	Realisasi	persentase
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Anggaran Rp. 25,204,045,000 Realisasi Rp. 22,469,984,306 Atau 89,15%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Rp. 25,204,045,000 Realisasi Rp. 22,469,984,306Atau 89,15%	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen			100%
			Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen			100%
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik			
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR			
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik			
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan				
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR			



			Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan				
			Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum				
			Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha			
			Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat			
			Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit			
			Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit			
			Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM			
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit			
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit			
			Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga			
			Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan				
			erluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan				
			Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit			
			Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	523,427,500	517,354,000	98.84%
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	4,076,310,000	3,679,307,000	90.26%
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	9,703,400,000	9,038,961,800	93.15%
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	2,151,000,000	1,956,198,000	90.94%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	Anggaran		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0
			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air	Rumah	0	0	0



Rp. 24,031,910,500 Realisasi Rp. 24,031,910,500 atau 100%	Anggaran Rp. 24,031,910,500 Realisasi Rp. 24,031,910,500 atau 100%	Limbah terpusat skala Kota	Tangga			
		Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0
		Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0
		Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0
		Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0
		Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
		Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0
		Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0
		Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0
		Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	9,221,874,048	9,205,601,048	99.82%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rumah Tangga	235,159,800	211,230,530	89.82%
		Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0



3.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi)

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda IV/c	1
Sekretaris	Pembina Tk. I IV/b	1
Kepala Bidang	Pembina IV/a	1
Kepala Subbagian	Penata Tk.I III/d	2
Jafung	Pembina IV/a	1
Jafung	Penata Tk.I III/d	2
Staf	PNS	7
Staf	-	19
TOTAL		34

3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi)

PERMASALAHAN	SOLUSI
Terbatasnya Anggaran	Mengusulkan Sumber Dana
Kurangnya Sumber Daya/Personil yang berkualitas	- Mengusulkan penambahan personil/SDM yang berkualitas - Kerjasama dengan Pihak Ketiga /Konsultan
Semakin Berkurangnya Jumlah Sumber Mata Air	- Penghijauan Kembali
Jauhnya Jarak Tempuh Ke Lokasi Kegiatan pada saat pelaksanaan konstruksi	- Mempercepat waktu pelaksanaan pekerjaan - Berkoordinasi secara intens dengan Desa dan Kecamatan



Seringnya muncul masalah sosial	3.6.1. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara musyawarah mufakat 3.6.2. Melibatkan Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan
Sengketa lahan	3.6.3. - Melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara musyawarah mufakat 3.6.4. Kerja sama dan melibatkan APH dalam menyelesaikan sengketa

4. Urusan Perumahan Rakyat

4.1. Jenis Pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota; dan

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

4.2 Target Pencapaian

Target dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	100%



4.3. Realisasi

Realisasi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI	REALISASI
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	100%	15	15	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	100%	10	10	100%

4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0



			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0
			Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	44,243,000	43,943,000	99.32 %
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			%
			Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	375,000,000	375,000,000	100.00 %
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
			Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0
			Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	350,000,000	350,000,000	100%
			Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0
			Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0



4.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	IV/b	1
Sekretaris	IV/b	1
Kepala Bidang Perumahan	IV/a	1
Kepala Bidang Permukiman	III/d	1
Kepala Bidang Pertanahan	III/d	1
Kepala Subbagian	III/d	1
Jafung	III/d	10
Staf	III/d	1
Staf	III/c	2
Staf	III/b	6
Staf	III/a	7
Staf	II/d	8
Staf	II/c	2
TOTAL		42

4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Bima sebagai berikut :



Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kurang ketersediaan data pendukung	Harus adanya data pendukung dari awal Kegiatan
Waktu pelaksanaa yang belum terjadwal secara sistimatis	Di buatkan jadwal dari awal Kegiatan
Masih terdapat warga yang menolak ditempatkan di lokasi yang baru bagi rumah korban bencana	Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1 Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Tahun 2025 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan informasi rawan bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

5.2. Target Pencapaian

Target dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%



Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
--	--	------

5.3 Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PELAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI	REALISASI
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	1.032	1.032	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30.109	160.154	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30.109	160.154	100%
Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	108	108	100%



5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Rp. 278,250,000 Realisasi Rp. 275,946,600 atau 99,17%	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen			
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	20,742,500	20,742,500	100%
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang			
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen			
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	7,322,000	5,544,000	75.72
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan	Laporan			0



		Peraturan Daerah dan Perkada				
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	43,675,000	43,261,100	0
		Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokume			
		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang			
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang			
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang			
		Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Orang			
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus			
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan	Laporan	146,510,500	146,459,000	99.96



			Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus			
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	60,000,000	59,940,000	99.90
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Anggaran Rp. 121,542,000 Realisasi Rp. 112,368,000 atau 79,39%	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1,000,000		
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	120,542,000	112,368,000	93.22 %
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0
			Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan,				



			Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				
			Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				
			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
		Pembinaan Penyidik	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0
		Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen			
		Anggaran Rp. 1,000,000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan			
		Realisasi Rp. 1,000,000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan			
		atau 100 %	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1,000,000	1,000,000	100.00 %
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	15,876,000	15,876,000	100.00 %
		Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	199,110,000	187,660,000	94.25 %
		Anggaran					



		Rp. 214,986,000 Realisasi Rp. 203,536,000 atau 94.67 %					
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Anggaran		Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0.00	0.00%
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	26,927,500	26,927,500	100 %
		Rp. 926,104,500 Realisasi Rp. 832,331,845 atau 89,87%	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	35,708,000	35,253,345	98.73%
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0.00	0.00	0.00
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0.00	0.00	0.00
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	95,975,000	68,375,000	71.24 %
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0.00	0.00	0.00
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	449,514,000	529,349,960	87.96 %
			Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	26,245,000	19,625,000	74.78
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	69,210,000	68,361,000	98.77%
			Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	25,385,000	20,860,000	82.17 %
			Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga	0	0	0



		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	196,725,000	196,281,000	99.77 %
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Anggaran Rp. 738,963,000 Realisasi Rp. 734,225,000 atau 99.36%	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	8,468,500	8,390,000	99.07 %
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	251,124,500	248,241,000	98.85 %
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	8,600,000	8,243,000	95.85%
		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang			
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	428,450,000	427,258,000	99.72 %
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Dokumen	33,489,000	33,384,000	99.69 %
		Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Laporan	8,831,000	8,709,000	98.62 %



	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Anggaran Rp 196,012,500 Realisasi Rp. 138,549,901 atau 70.68 %	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	15,588,000	8,559,000	54.91 %
		Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	16,650,000	16,650,000	100.00 %
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	29,748,000	13,139,000	44.17 %
		Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0
		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	16,021,000	9,944,000	62.07 %
		Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang			
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang			
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	118,005,500	90,257,901	76.49 %
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga			
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan			
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen			



Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan,	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				
		Pengendalian, Pemadaman,	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	72,850,000	72,271,000	99.21 %	
		Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	18,150,000	18,130,000	99.89 %	
		Berbahaya dan Beracun	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	15,150,000	14,882,000	98.23 %	
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	38,152,750	38,045,750	99.72 %	
		Anggaran Rp. 502,650,150	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	278,832,000	278,824,000	100.00 %	
		Realisasi Rp.498,249,440 Atau 99.12 % %	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	60,735,400	60,268,000	99.23 %	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit				
			Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	18,780,000	15,828,690	84.28 %	
			Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	20,263,500	19,300,000	95.25 %
			Anggaran Rp. 20,263,500	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0



		Realisasi Rp 19,300,000 atau 95.25%					
		Investigasi Kejadian Kebakaran Anggaran Rp. 25,710,000 Realisasi Rp. 25,600,000 atau 99.57 %	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	25,710,000	25,600,000	99.57 %
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Anggaran Rp. 184,915,900 Realisasi Rp. 168,697,000 Atau 91.23 %	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	72,561,000	63,737,000	87.84 %
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	55,858,900	48,829,000	87.41 %
			Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	56,496,000	56,131,000	99.35 %
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Anggaran Rp. 63,543,500	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	30,540,000	27,693,000	90.68 %
			Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0
			Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan	Unit	19,327,500	18,949,000	98.04 %



		Realisasi Rp, 60,318,000 atau 94.92 %	pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi				
			Pembinaan aparatatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0
			Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	13,676,000	13,676,000	100.00 %



5.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Dukungan Personil Satpol PP SPM Urusan Trantibumlinmas

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Kepala Satuan	Pembina TK. I / Gol. IV b	1 orang
Sekretaris	Pembina / Gol. IV a	1 orang
Kepala Bidang	Pembina / Gol. IV a	2 orang
	Penata TK. I / Gol. III d	1 orang
Kepala Seksi	Penata TK. I / Gol. III d	1 orang
	Penata / Gol. III c	4 orang
	Penata Muda TK. I / Gol. III b	1 orang
Kepala Sub Bagian	Penata TK. I / Gol. III d	1 orang
	Penata Muda TK. I / Gol. III b	1 orang
Staf	Penata / Gol. III c	6 orang
	Penata Muda TK. I / Gol. III b	9 orang
	Penata Muda / Gol. III a	18 orang
	Pengatur TK. I / II d	11 orang
	Pengatur / II c	0
	Pengatur Muda TK. I / II b	1 orang
	Pengatur Muda / II a	0
Tenaga Penunjang Utama (TPU)		845 orang
Total		903 orang

Dukungan Personil BPBD dalam Pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Sekretaris	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
Kepala Bidang	Pembina (IV/a)	3
Kepala Subbagian	Penata Tingkat I (III/d)	1
Jafung	Penata Tingkat (III/d)	5
Jafung	Penata (III/c)	1



Jafung	Penata Muda Tingkat (III/b)	1
Staf	Penata Tingkat I (III/d)	2
Staf	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
Staf	Pengatur Tingkat I (II/d)	12
Staf	Pengatur (II/c)	1
TOTAL		30

Dukungan Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian	Jumlah
	Pembina Tk.I-IV/b	2 Orang
	Pembina-IV/a	5 Orang
	Penata TK.I-III/d	6 Orang
	Penata-III/c	3 Orang
	Penata Muda-IIIa	7 Orang
	Penata Muda TK.I-III/b	-
	Pengatur-II/c	1 Orang
	Jumlah	24 Orang

5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Urusan POLPP

Permasalahan	Solusi
Minimnya dukungan anggaran terhadap sub kegiatan dalam pelaksanaan SPM diantaranya sarana dan prasarana Satpol PP (Jumlah dan kualitas barang dan jasa, seperti kendaraan operasional dan perlengkapan operasional, peningkatan kapasitas SDM (tidak adanya PPNS) dan dukungan anggaran penegakan perda dan perkara sampai pada warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian material (Kerusakan akibat penegakan Perda) dan Warga Negara yang	Adanya dukungan anggaran terhadap sub kegiatan dalam melaksanakan SPM sehingga dalam penyusunan rencana aksi dan pelaksanaannya tersinkronisasi dan pencapaian SPM dapat terlaksana dengan baik



memperoleh pelayanan pengobatan akibat penegakan perda dan perkara)	
---	--

Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Urusan BPBD

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum optimalnya kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi terhadap warga dikawasan rawan bencana	Lebih ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi terhadap warga dikawasan rawan bencana pada tahun 2025 dan pada tahun-tahun berikutnya
Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya	Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di Daerah Kabupaten Bima sesuai dengan kemampuan daerah
Minimnya anggaran yang tersedia untuk pembentukan desa tangguh bencana dalam pengurangan risiko bencana	Tersedianya anggaran pembentukan desa tangguh bencana yang berkelanjutan dan pemenuhan sarana prasarana dalam penguatan kapasitas kawasan
Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di Pemerintah Kabupaten Bima	Perlunya koordinasi penguatan kelembagaan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten Bima;
Belum maksimalnya kapasitas aparatur Penanggulangan Bencana/TRC dalam pengelola peralatan dalam pengoperasian peralatan penanggulangan bencana	Perlu pengembangan kapasitas aparatur PB/TRC melalui pelatihan/diklat

Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan SPM Urusan Damkar

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan luar karakteristik kondisi lapangan	Pengadaan sarana prasarana yang sesuai dengan perbandingan antara luas wilayah dan cakupan pelayanan kebakaran dan penyelamatan
Sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan jumlah personil yang mengikuti pelatihan pemadaman dan penyelamatan
Masih lemahnya sistem pendataan/informasi	Meningkatkan kemampuan sistem pendataan/informasi
Masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana kebakaran	Meningkatkan infrastruktur mitigasi kebakaran
Kurangnya sosialisasi masyarakat tentang penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana kebakaran



6. Urusan Sosial

6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Target Pencapaian

Target dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

URAIAN	TARGET
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 100% sosial	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	100%



6.3 Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

URAIAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA	REALISASI
	BERHAK MENDAPAT PELAYANAN	NEGARA TERLAYANI	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	174	174	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	160	160	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	260	260	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	12	12	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	768	768	100%

6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Anggaran Rp. 1,836,938,250 Realisasi Rp. 1,828,435,635 atau 99,54%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Anggaran Rp. 1,157,013,500 Realisasi	Penyediaan permakanan	Orang	618,167,000	616,667,900	100 %
			Penyediaan sandang	Orang	276,015,500	275,785,000	100.00 %
			Penyediaan alat bantu	Orang	232,382,500	232,382,500	100.00 %
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	60,500,000	60,439,800	99.90 %
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	Orang			



		Rp. 1,149,756,785 atau 99,37%	dan masyarakat				
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang			
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			
			Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	13,245,000	12,720,385	
			Pemberian layanan kedaruratan	Orang			
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			
			Pemberian layanan rujukan	dokumen	17,203,500	12,201,000	99.69 %
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Sosial Kab./ Kota		Penyediaan makanan	Orang	218,788,000	218,788,000	100 %
			Penyediaan sandang	Orang	356,984,750	356,984,750	100 %
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang			
	Anggaran	Rp. 679,924,750	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			
	Realisasi	Rp. 678,678,850 atau 98,82%	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	104,152,000	102,906,100	98.80 %
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		287,893,400	285,623,200	99.21 %
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20,000,000	20,000,000	100.00 %

6.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Dukungan Personil Pelaksanaan SPM Urusan Sosial

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	IV c	1
Sekretaris	IV a	1
Kepala Bidang	III d	3



Kepala Subbagian	III c	1
Jafung	III d	8
Staf	III d	4
	III c	1
	III b	8
	III a	5
	II d	5
	II c	1
TOTAL		38

6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Kabupaten Bima sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM

PERMASALAHAN	SOLUSI
Sebagian penyandang disabilitas, lanjut usia terlanar, anak terlanar, gelandangan dan pengemis belum tercover dalam DTKS	Dilakukan pengusulan untuk DTKS
Sebagian Data belum dilakukan verivali dan Assesment	Dilakukan verivali dan Assesment
Perhitungan kebutuhan belum maksimal karena sebagian komponen pembiayaan tidak dapat dipenuhi	Perlu penambahan alokasi anggaran
Belum mampu mengakomodir semua Sub Kegiatan pendukung SPM	Perlu penambahan alokasi anggaran
Belum tersedia kendaraan khusus kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas terlanar, Lanjut Usia Terlanar, Anak Terlanar serta Gelandangan dan Pengemis	Pengadaan Kendaraan



BAB V

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan daerah kepada Presiden akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan format dan sistematika penyusunan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100..2.7/989/OTDA .

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima dibuat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya kewajiban Kepala Daerah dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. LPPD diharapkan juga dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bima, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketentuannya.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Pemerintah Daerah baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Pemerintah Kabupaten Bima juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Bima, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bima yang mendukung situasi dan



kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa, evaluasi serta saran dan kritik digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.